



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 PN : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional		14,50 Persen	74 246 214,9	
		02 - Skor Pola Pangan Harapan		91,60 Nilai		
		03 - Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan		11 Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)		
	02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio Kewirausahaan Nasional		3,65 Persen		
		02 - Pertumbuhan PDB Pertanian		3,32-3,88 Persen		
		03 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan		4,68-5,46 Persen		
		04 - Kontribusi PDB Industri Pengolahan		19,63-19,84 Persen		
		05 - Nilai Devisa Pariwisata		US\$4,80-8,50 Miliar		
		06 - Kontribusi PDB Pariwisata		4,20 Persen		
		07 - Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun		2,30-2,90 Juta Orang		
		08 - Pertumbuhan Investasi (PMTB)		6,40 Persen		
01.01 PP : Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	2	11,98 Giga Watt	653.957,7	
		02 - Pemanfaatan biofuel untuk domestik	2	10,20 Juta Kiloliter		
	01.01.01 KP : Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2	1.001,1 MW	631 970,3
01 01 01.01 ProP Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan PLTA	2	440,3 MW	631 970,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2	80 MW		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.2-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2	152 MW		
		04 - Kapasitas terpasang tambahan PLTS	2	328,8 MW		
01.01.02 KP : Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah pemanfaatan biofuel untuk domestik	2	10,2 Juta KL	7 890,0	
01.01.02.01 ProP : Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	02 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	2	B30 Persen	7 890,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian
01.01.04 KP : Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik	01 - Alokasi batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) yang direncanakan	2	168 Juta Ton	5 219,5	
		02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2	65 Persen		
01.01.04.01 ProP : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 Laporan	5 219,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
01.01.05 KP : Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	2	44 Persen	1 730,3	
01.01.05.01 ProP : Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan Industri EB	01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 Indeks Skala 100	1.730,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
01.01.03 KP : Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas energi primer	2	138 SBM/Rp Miliar	7 147,6	
		02 - Penurunan intensitas energi final	2	0,9 SBM/Rp Miliar		
01.01.03.01 ProP : Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 Persen	7 147,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
01.02 PP : Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (<i>water productivity</i>)	5	3,30 m ³ /kg	29.285.586,8	
01.02.01 KP : Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 Juta Ha	343 917,0	
01.02.01.01 ProP : Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5	7 Ekoregion	52.112,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.3-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.02.01.02 ProP Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	1.500 Desa	291.804,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.02 KP : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,1 Juta Ha	194.618,2	
01.02.02.01 ProP Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	2	30 Juta m'	14.846,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.02.02 ProP : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	40 Unit	179.772,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.02.03 KP : Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	17.860 Ha	9.208.282,0	
01.02.03.01 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	16.860 Ha	9.155.787,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	51.400 Ha		
01.02.03.02 ProP : Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi	01 - Terlaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	01 - Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi	2	1.000 Ha	52.494,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.04 KP : Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	87,37 m ³ /detk	1.060.388,4	
01.02.04.01 ProP : Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	2	3,5 m ³ /detk	1.060.388,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.05 KP : Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	385.000 Ha	1.243.689,7	
01.02.05.01 ProP : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi secara nasional	2	385.000 Ha	926.309,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.1.4-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 02 05.02 ProP . Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi/ penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Perbaiki kualitas Danau Prioritas Nasional	2	15 Danau Prioritas	317.379,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
01.02.06 KP : Pengembangan Waduk Multiguna	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	15,10 Miliar m ³	17.234.691,5	
		02 - Jumlah tampungan yang ditingkatkan pemanfaatannya	2	15 Unit		
01.02.06 01 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	2	13 Unit	16.040.853,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.02.06 02 ProP Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	15 Unit	1.193.837,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01.03 PP : Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	102,00 - 104,00 Nilai	19.626.715,2	
		02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2.100 Kkal/Hari		
		03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57 Gram/Kapita/Hari		
		04 - <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5	5,80 Persen		
		05 - <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	5	4,80 Persen		
01.03.01 KP : Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi ikan	5	58,08 Kg/Kapita/Tahun	917.480,9	
		02 - Konsumsi daging	5	13,8 Kg/Kapita/Tahun		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	273,2 Gram/Kapita/Hari		
		04 - Konsumsi protein asal ternak	5	10,7 Gram/Kapita/Hari		
		05 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	40 Persen Penerima BPNT		
		06 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	85-95 Persen		
		07 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	2	50000 Hektare		
		08 - Persentase pangsa pangan organik	5	8 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
-A.I.5-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.01.01 ProP : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	01 - Jumlah produksi ubi kayu	5	21,23 Juta Ton	554.227,4	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian
		02 - Jumlah produksi ubi jalar	5	2,1 Juta Ton		
01.03.01.02 ProP : Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Terlaksananya peningkatan keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	91 Persen	307.028,5	Kementerian Pertanian
01.03.01.03 ProP Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 Varietas	56.225,0	Kementerian Pertanian
01.03.02 KP : Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	01 - Penggunaan benih bersertifikat	5	65 Persen	5.671.645,8	
		02 - Ketersediaan beras	5	42,7 Juta Ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,6 Juta Ton		
		04 - Produksi jagung	5	31,9 Juta Ton		
		05 - Produksi daging	5	4,2 Juta Ton		
		06 - Produksi umbi-umbian	5	24,6 Juta Ton		
		07 - Produksi sayuran	5	16,2 Juta Ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	23,12 Juta Ton		
01.03.02.01 ProP Peningkatan Produksi Padi	01 - Terlaksananya peningkatan produksi padi	01 - Peningkatan produksi padi	5	5,67 Persen	1.842.268,0	Kementerian Pertanian
01.03.02.02 ProP : Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Peningkatan produksi jagung	5	3,4 Persen	1.484.860,7	Kementerian Pertanian
01.03.02.03 ProP : Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Peningkatan produksi kedelai	5	7,08 Persen	185.503,3	Kementerian Pertanian
01.03.02.04 ProP : Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Peningkatan produksi daging	5	5,28 Persen	1.459.175,9	Kementerian Pertanian
01.03.02.05 ProP : Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Peningkatan produksi sayur-sayuran	5	2,70 Persen	699.837,9	Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan produksi buah-buahan	5	4,30 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.1.6-

FN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.03.03 KP : Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	70-80 Persen	1 108 438,9	
		02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	51,7 Juta Rp/Tenaga Kerja/Tahun		
01.03.03.01 ProP Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Jumlah asuransi usaha tani padi	5	1 000 000 Hektare	177.680,0	Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	150 000 Ekor		
01.03.03.02 ProP Pendidikan Pertanian	01 - Terlaksananya pendidikan pertanian	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian	5	75 persen	260 339,2	Kementerian Pertanian
01.03.03.03 ProP Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	5	65 Persen	492 450,5	Kementerian Pertanian
		02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	19 Persen		
01.03.03.04 ProP Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani	5	33 Korporasi Petani	177.969,2	Kementerian Pertanian
01.03.04 KP : Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatnya keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	65 Persen	2.851 751,0	
		02 - Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas	5	30 Varietas Unggul Baru dan Galur		
		03 - Jumlah varietas unggul hewan untuk pangan yang dilepas	5	8 Varietas Unggul Baru dan Galur		
		04 - Sumber daya genetika dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4250 Akses		
01.03.04.01 ProP Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan	5	34,35 Persen	507 457,9	Kementerian Pertanian
01.03.04.02 ProP Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Indeks ketersediaan lahan pertanian	5	65,84 Nilai	2 344.293,1	Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Desa PDTT
		02 - Indeks keberlanjutan lahan pertanian	5	99,84 Nilai		
01.03.05 KP : Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Terlaksananya peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	01 - <i>Global Food Security Index</i>	5	65,5 Nilai	9 077.398,6	
01.03.05.01 ProP Stabilisasi Harga Pangan	01 - Terlaksananya stabilisasi harga pangan strategis	01 - Koefisien Varian Harga Pangan	5	2,0 Persen	61 869,9	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.1.7-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Iastansi Pelaksana
01.03.05.02 ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	01 - Terlaksananya penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	5	16 Persen	9.015.528,7	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		02 - Cadangan pangan nasional	5	2,0 Juta Ton		
01.04 PP : Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	24,60 Juta Ha	1.551.225,3	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤67 Persen		
		03 - Produksi perikanan	5	27,55 Juta Ton		
		04 - Produksi garam	5	3,10 Juta Ton		
		05 - Nilai Tukar Nelayan (NTN)	5	102-104 Nilai		
01.04.01 KP : Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 Unit	44.546,0	
		02 - Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	22 RZ		
01.04.01.01 ProP : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP	4	5 WPP	24.432,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.01.02 ProP : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	22 RZ	16.500,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.01.03 ProP : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah pengendalian pemanfaatan ruang laut dan reklamasi	5	9 Lokasi	3.613,4	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.02 KP : Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	10 Kawasan	23.836,7	
01.04.02.01 ProP : Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	6 kawasan	20.186,7	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.02.02 ProP : Pengembangan Marne Bioproduct dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan marne bioproduct dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	8 Paket	3.650,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.8-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahana Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.03 KP : Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	16,0 Juta Ton	1.205 057,1	
		02 - Produksi rumput laut	5	11,55 Juta Ton		
01 04 03.01 ProP : Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	8,08 Juta Ton	944 145,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Produksi ikan budidaya	5	7,92 Juta Ton		
01 04 03 02 ProP : Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	11,55 Juta Ton	36 900,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01 04 03 03 ProP : Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	3,1 Juta Ton	122.797,3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.03 04 ProP : Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	5	90 Persen	101 213,9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.04 KP : Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatnya fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	Rp3,3 Triliun	95 665,9	
		03 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	5	102 Indeks		
01.04.04 01 ProP : Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	125.000 orang	25.100,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.04.02 ProP : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya	5	20.500 Bidang	51 308,1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04 04 03 ProP : Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah	4	34 Provinsi	19.257,8	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.05 KP : Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta <i>database</i> kelautan dan perikanan	01 - Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan	5	8 Hasil Riset	182 119,6	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.9-

PN/PP/KP/ProP	Basaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.04.05.01 ProP Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	410.000 Orang	141 226,6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.04.05.02 ProP Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Jumlah riset kemaritiman dan kelautan	5	26 Hasil Riset	40 893,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.05 PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	5	26,50 Persen	1 301 800,1	
		02 - Pertumbuhan wirausaha	5	2,50 Persen		
		03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	5	5,20 Persen		
01.05.01 KP : Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	5	9 Persen	241 294,9	
01.05.01.01 ProP Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	5	7990 UMKM	223 449,9	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perdagangan
01.05.01.02 ProP : Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	5	777 UMKM	11 308,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.05.01.03 ProP Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	5	500 UMKM	6.537,0	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.02 KP : Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	20,3 Persen	199 769,1	
		02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	5	2,8 Persen		
		03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	65 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.10-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 05 02 01 ProP Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	6.900 Orang	178.942,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05 02.02 ProP . Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	10000 UMKM	17.811,2	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian
01.05.02.03 ProP Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	850 UMKM	3 015,8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03 KP : Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	75 Koperasi	44 825,0	
01 05.03 01 ProP Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	5	2 300 Orang	16 775,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05 03 03 ProP . Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupannya	5	525 Koperasi	13.750,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 05 03 04 ProP Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	225 Koperasi	8.800,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.03 02 ProP : Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	5	3000 Orang	5.500,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.05.04 KP : Peningkatan Penciptaan Start-up dan Peluang Usaha	01 - Meningkatnya penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	01 - Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	1.650 WUB	810.811,1	
		02 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	18,8 Persen		
		03 - Penumbuhan <i>start-up</i>	5	700 Start-Up		
01.05 04 01 ProP Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	5	82.400 Orang	559.149,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.11-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian
01.05.04.02 ProP Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	5	200 Orang	160.400,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian
01 05.04 03 ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	7170 UMKM	47 455,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 05.04.04 ProP Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	20 Sentra IKM Kumulatif	43 806,0	Kementerian Perindustrian
01.05.05 KP : Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,1 Persen PDB	5 100,0	
01.05.05.01 ProP Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	44 Lembaga	5.100,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01.06 FP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 03 - Nilai tambah ekonomi kreatif 04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan 05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja 06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata 07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif 08 - Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EODB 09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN 10 - Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan	5 5 5 1 1 1 5 5 5	4,75-5,54 Persen 17,63-17,84 Persen Rp1 277,00 Triliun 18,35 Juta Orang 14,00 Persen 14,30 Juta Orang 17,90 Juta Orang Menuju Peringkat 40 Rp858,50 Triliun Rp268,70 Triliun	15 519 229,6	
01.06.01 KP : Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kematriman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman 02 - Pertumbuhan PDB perkebunan 03 - Peningkatan produksi kakao	5 5 5	5,00-5,50 Persen 5 Persen 2,3 Persen	2.255.765,1	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.12-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Peningkatan produksi kopi	5	1,5 Persen		
		05 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	5,9 Persen		
		06 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	5,8 Persen		
01.06.01.01 ProP Pengembangan Industri Berkas Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	01 - Produksi kopi	5	0,78 Juta Ton	1.191.326,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Produksi kakao	5	0,76 Juta Ton		
		03 - Produksi karet	5	3,63 Juta Ton		
		04 - Produksi kelapa dalam	5	2,98 Juta Ton		
01.06.01.02 ProP Pengembangan Industri Berkas Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	01 - Pertumbuhan volume ekspor pertanian	5	1,35 Persen	798.759,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan
01.06.01.03 ProP Pengembangan Industri Berkas Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Pertumbuhan PDB Industri Furnitur	5	4,00-5,00 Persen	18.473,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.06.01.04 ProP Pengembangan Industri Kemartanian	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemartanian	01 - Pertumbuhan PDB perikanan	5	8,11 Persen	209.792,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
01.06.01.05 ProP Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	01 - Pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	5	6,00-7,25 Persen	37.413,2	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
01.06.02 KP : Peningkatan Industrialisasi Berkas Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa	5	5 KI - KEK Industri	6.678.000,8	
01.06.02.01 ProP Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	5	5,00 - 6,25 Persen	6.655.936,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika
01.06.02.02 ProP Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batubara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	2	73,53 Persen	22.064,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.13-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	2	50,00 Persen		
01.06.03 KP : Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya 02 - Revitalisasi destinasi Bali 03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas 04 - Destinasi wisata berbasis <i>geopark</i> 05 - Destinasi wisata bahari	5 5 5 5 5	10 Destinasi 1 Destinasi 25 Unit 16 Destinasi 6 Destinasi	4.899.299,4	
01.06.03.01 ProP Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 Destinasi	70.618,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
01.06.03.02 ProP Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Destinasi yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung	5	18 Destinasi	4.522.721,9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kpau), Kementerian Perhubungan (Kpau)
01.06.03.03 ProP Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 Destinasi/Provinsi	59.471,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.03.04 ProP Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	4	3 Destinasi	233.988,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.03.05 ProP Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata <i>Geopark</i>	01 - Terlaksananya pengembangan 16 destinasi pariwisata <i>geopark</i>	01 - Jumlah koordinasi pengembangan <i>geopark</i>	5	1 Kegiatan	12.500,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
01.06.04 KP : Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	5,3 - 5,5 Persen	587.182,0	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.14-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	8,27 - 10,11 Persen		
01.06.04 01 ProP Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan <i>Brand</i>	01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan <i>brand</i>	5	3 Skema	239.204,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Brin), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi)
01.06.04 02 ProP Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	5	2 Kegiatan	10.100,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.04.03 ProP Fasilitasi Rantai Pasok dan <i>Scale-up</i> Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok dan <i>scale-up</i> karya dan platform kreatif unggulan	5	13 Kerja Sama	9.484,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.04 04 ProP Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif	5	19 Kawasan	94.947,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.04 05 ProP Pengembangan ' <i>Start-up Parks</i> ' dan <i>Center of Excellence</i>	01 - Terlaksananya pengembangan ' <i>start-up parks</i> ' dan <i>center of excellence</i>	01 - Jumlah ' <i>start-up parks</i> ' dan <i>center of excellence</i> yang dikembangkan	5	3 Kerja Sama	7.000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.06.04 06 ProP Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	01 - Jumlah pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	5	5 Kegiatan	171.444,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
01.06.04.07 ProP Pengembangan Kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD)	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan <i>Be Creative District</i>	01 - Jumlah kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD) yang dikembangkan	2	1 Kegiatan	55.000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
01.06.05 KP : Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	03 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	5	49,7 Persen	1.087.305,2	
		05 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5	49 Persen		
		06 - Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	Bertahap K/L/D		
01.06.05 01 ProP Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	4	6 Usulan Rekomendasi	97.121,5	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.15-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.06.05.02 ProP : Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I, II, III, dan IV	5	124 Perusahaan	833 162,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
01.06.05.03 ProP : Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	5	1 634 775 Orang	157 020,8	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
01.06.06 KP : Pengembangan Industri Halal	01 - Meningkatnya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	2 Sektor Industri	11 677,1	
01.06.06.01 ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan infrastruktur industri halal	01 - Jumlah kawasan dengan zona tematik industri halal yang difasilitasi	5	2 Kawasan Industri	11.677,1	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
01.07 PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan	5	US\$10,76-12,75 Miliar	1 293 200,4	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	5,96-7,86 Persen		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	4,0 - 7,0 Juta Kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	180 - 220 Juta Perjalanan		
01.07.01 KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0 - 10,0 Persen	85 827,7	
		02 - Ekspor hasil pertanian (FOB)	5	US\$4,3 Miliar		
		03 - Ekspor hasil perikanan	5	US\$6,05 Miliar		
		04 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	76,5 Persen		
		05 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	11,4 Persen		
		06 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	5,96 - 7,86 Persen		
		07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	2,8 Persen		
		08 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	US\$2,6 Miliar		
		09 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	US\$122,8 - 127,5 Miliar		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.16-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.01.01 ProP : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	30 Perusahaan	4.500,0	Kementerian Perindustrian
01 07.01.02 ProP Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitas pengembangan produk	5	155 Produk	81.327,7	Kementerian Perdagangan
01.07.02 KP : Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	220 Negara	232.748,9	
		02 - <i>Share</i> ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	1,3 Persen		
		03 - <i>Share</i> ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	3,3 Persen		
01 07 02 01 ProP . Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah promosi dan misi dagang	5	26 Kegiatan Promosi	115.559,1	Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian
01.07 02.02 ProP : Fasilitas Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitas ekspor	01 - Jumlah kegiatan fasilitas ekspor	5	56 Fasilitas	52.399,5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
01 07 02 03 ProP Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	US\$41,08 Miliar	64.790,3	Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Nilai ekspor produk industri sektor Agro	5	US\$57,05 Miliar		
		03 - Nilai ekspor produk industri sektor IKFT	5	US\$35,97 Miliar		
01.07.03 KP : Pengelolaan Impor	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	5	49,9 Persen	7.772,6	
		02 - Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN	5	6.630 Produk Per Tahun		
01.07.03.01 ProP Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan <i>post border</i>	5	825 Benta Acara	7.772,6	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian
01.07.04 KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	5	5,0 Persen	11.784,9	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.I.17-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.07.04.01 ProP Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	01 - Jumlah katalog produk dalam negeri	5	15 Katalog	11.784,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
01.07.05 KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	01 - Meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global	5	4 Sektor	90.700,0	
01.07.05.01 ProP Peningkatan Investasi (<i>Inbound & Outbound</i>) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (<i>inbound</i> dan <i>outbound</i>) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah investasi asing yang masuk di sektor industri	5	5 Investor/Perusahaan	90.700,0	Kementerian Perindustrian
01.07.06 KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	01 - Meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi <i>branding</i> , dan produk kreatif	01 - Jumlah <i>branding</i> Wonderful Indonesia	5	10 Destinasi <i>Branding</i>	524.078,2	
		02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	US\$17,45 Miliar		
		03 - Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (<i>cultural heritage regeneration</i>)	5	8 (Kumulatif) Lokasi		
01.07.06.01 ProP <i>Branding</i> Wonderful Indonesia	01 - Terlaksananya <i>branding</i> Wonderful Indonesia	01 - Jumlah media <i>branding</i>	5	4 Media	300.000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07.06.02 ProP : Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	3 Regional Pemasaran	150.091,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07.06.03 ProP : Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui <i>e-commerce</i>	01 - Terlaksananya perluasan pemasaran produk kreatif, termasuk melalui <i>e-commerce</i>	01 - Jumlah pemasaran produk kreatif, termasuk melalui <i>e-commerce</i>	5	89 Jenama/Orang	11.961,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07.06.04 ProP : Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1	13.000 Orang	62.025,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.07.07 KP : Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	01 - Meningkatkan efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan Diplomasi Ekonomi	01 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	91 Negara	340.288,1	
		02 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	5	88 Negara		
		03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	5	4 Ratifikasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.I.18-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah promosi <i>Tourism, Trade, and Investment</i> (TTI) terintegrasi	5	8 Promosi Terintegrasi		
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	25 (Kumulatif) Kesepakatan		
01.07.07.01 ProP Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	1 Kegiatan	736,5	Kementerian Perdagangan
01.07.07.02 ProP Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	5	160 Dokumen	73.679,5	Kementerian Perdagangan
01.07.07.03 ProP Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	7 Pameran	265.872,1	Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
01.08 PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Meningkatnya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,17 Persen	5.014.499,8	
		02 - Biaya logistik terhadap PDB	5	22,20 Persen		
		03 - Rasio M2/PDB	5	39,74 Persen		
		04 - Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i>	5	Peringkat 36-39		
		05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	5	11,99 Persen		
		06 - Imbal Hasil (<i>yield</i>) Surat Berharga Negara	5	Menurun Persen		
		07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	5	25,94 Persen		
01.08.01 KP : Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio Kredit/PDB	5	32,6 Persen	11.536,2	
		02 - Jumlah ATM per 100.000 penduduk	5	56,3 Unit		
		03 - Jumlah kantor Bank per 100.000 penduduk	5	15,4 Unit		
		04 - Skema pembiayaan berbasis HKI	5	1 Skema		
01.08.01.01 ProP Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Jumlah peraturan perundangan peningkatan skema pembiayaan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif	3	4 Peraturan Perundangan	10.849,7	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
-A.I.19-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01.08.01.02 ProP : Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah	01 - <i>Turnover</i> Rasio SBN	5	5,02 Persen	686,5	Kementerian Keuangan
01.08.02 KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	3,5 Persen	2 373 255,3	
		02 - Nilai transaksi <i>e-commerce</i>	5	Rp345 Triliun		
		03 - Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	1	9.000 Orang		
01.08.02.01 ProP : Penguatan Industri <i>Fintech</i> , <i>E-Commerce</i> , <i>On-Demand Service</i> , dan <i>Internet Of Things</i>	01 - Terlaksananya penguatan industri <i>fintech</i> , <i>e-commerce</i> , <i>on-demand service</i> , dan <i>internet of things</i>	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan	5	200 Fasilitator	5 242,5	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian
01.08.02.02 ProP : Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan yang didampingi	5	195 Perusahaan	2.368 012,8	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
01.08.03 KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	01 - Skor <i>Logistic Performance Index</i>	5	3,2 Indeks	1.700 140,6	
		02 - Tingkat inflasi	5	2,0 - 4,0 Persen		
01.08.03.01 ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	67 Sarana dan Prasarana	1 671.390,4	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan
01.08.03.02 ProP : Pengendalian Inflasi	01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	2,3 - 4,3 Persen	28.750,2	Kementerian Perdagangan
01.08.04 KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	4 Persen	47 259,9	
		02 - Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	5	10 Lokasi		
01.08.04.01 ProP : Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Terlaksananya penerapan standar pariwisata berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan	5	10 Destinasi	29.401,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
01.08.04.02 ProP : Penerapan Industri Hijau	01 - Terlaksananya penerapan industri hijau	01 - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	5	2 000 Perusahaan	17.858,3	Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian
01.08.05 KP : Reformasi Fiskal	01 - Terlaksananya reformasi fiskal	01 - Persentase realisasi penerimaan negara	5	100 Persen	684 743,0	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.1.20-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
01 08.05.01 ProP Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Penyelesaian modul <i>core tax system</i>	5	2 Modul	684.043,0	Kementerian Keuangan
01.08 05.02 ProP . Perumusan Kebijakan Terkait PPnBM Sektor Properti	01 - Terlaksananya kajian terkait PPnBM Sektor Properti	01 - Persentase penyelesaian rekomendasi kebijakan efektivitas dan efisiensi PPnBM di sektor properti	5	100 Persen	700,0	Kementerian Keuangan
01.08.06 KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	3 Database	197 564,8	
		02 - Ketersediaan data dan informasi statistik <i>e-commerce</i>	5	1 Database		
		03 - Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	2 Database		
01 08 06 01 ProP . Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	2 Database	58 394,8	Badan Pusat Statistik
01 08.06.02 ProP Pengembangan Statistik <i>E-Commerce</i>	01 - Terlaksanakannya Pengembangan Statistik <i>e-commerce</i>	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik <i>e-commerce</i> yang dikembangkan	5	1 Database	11.260,0	Badan Pusat Statistik
01 08.06.03 ProP Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksanakannya Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	2 Database	127.910,0	Badan Pusat Statistik

Keterangan.

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
- 4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.1-**

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 PN : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia	01 - Laju pertumbuhan PDRB KTI		4,2-6,1 Persen/Tahun	74.318.287,0	
		02 - IPM KTI		61,1-77,7 Nilai Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin KTI		11,5 Persen		
	02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia	01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI		4,5-5,4 Persen/Tahun		
		02 - IPM KBI		70,1-82,5 Nilai Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin KBI		8,4 Persen		
02.01 PP : Pembangunan Wilayah Sumatera	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	3,9 – 5,1 Persen/Tahun	10.196.826,2	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	5	70,1-76,5 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera	5	9,6 Persen		
02.01.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	1.713.614,8	
		02 - Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	2 Jumlah Destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	4 Kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	1 Jumlah KI		
02 01.01.01 ProP . Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	> 1 Nilai	284.459,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan
02 01 01.02 ProP . Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	> 1 Nilai	12.500,0	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.2-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.01.03 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5	> 1 Nilai	848.612,2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02.01.01.04 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5	> 1 Nilai	191.972,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan
02.01.01.05 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	> 1 Nilai	1.000,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.01.01.06 ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	> 1 Nilai	315.000,0	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BPKPB Batam)
02.01.01.07 ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	> 1 Nilai	1.300,0	Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.01.01.08 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	> 1 Nilai	58.770,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan
02.01.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	131.995,8	
02.01.02.01 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	4,0 Persen	9.338,3	Kementerian Pertanian
02.01.02.02 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	2,0 Persen	1.921,0	Kementerian Pertanian
02.01.02.04 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	2.742,5	Kementerian Pertanian
02.01.02.05 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.3-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahannya Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.02.06 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	4 500,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02.07 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh	5	5,0 Persen	700	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.10 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	2,0 Persen	3 549,7	Kementerian Pertanian
02 01.02 11 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	2,0 Persen	4 563,0	Kementerian Pertanian
02.01.02 12 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	4,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01.02.14 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.15 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara	5	1,5 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01 02 16 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	1,0 Persen	1 917,5	Kementerian Pertanian
02.01.02.17 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	1,0 Persen	1 704,0	Kementerian Pertanian
02.01.02.19 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.02.21 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	2,3 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02.22 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01.02.23 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01 02 24 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	1,0 Persen	2 667,0	Kementerian Pertanian
02 01 02.25 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	1,0 Persen	826	Kementerian Pertanian
02.01.02.27 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02 31 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	1,0 Persen	3.959	Kementerian Pertanian
02.01 02 32 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	3,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02 01.02.33 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	1,0 Persen	2.799	Kementerian Pertanian
02.01.02.35 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi	5	2,8 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01 02.36 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	9.854,5	Kementerian Pertanian
02 01 02.37 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	8.401,0	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.5-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.02.38 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	13.264,7	Kementerian Pertanian
02.01.02.39 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	3,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.01.02.41 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.42 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.45 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu	5	5,0 Persen	2.753,0	Kementerian Pertanian
02.01.02.46 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu	5	2,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.48 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu	5	2,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.01.02.49 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	1,0 Persen	10.961,2	Kementerian Pertanian
02.01.02.50 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	5,0 Persen	2.603,6	Kementerian Pertanian
02.01.02.51 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	2,0 Persen	9.773,9	Kementerian Pertanian
02.01.02.52 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	4,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.01.02.53 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	2,0 Persen	12.775,0	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.6-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 01.02 54 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	2,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.02.55 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01 02 56 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	5,0 Persen	17 811,9	Kementerian Pertanian
02.01 02 60 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01 02.62 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 01.02 08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh	5	3,0 Persen	2 610,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (Angka perhitungan sementara)	5	46,25 Nilai	6 416 733,3	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (Angka perhitungan sementara)	5	42,56 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (Angka perhitungan sementara)	5	38,50 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (Angka perhitungan sementara)	5	38,56 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (Angka perhitungan sementara)	5	56,13 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (Angka perhitungan sementara)	5	59,26 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (Angka perhitungan sementara)	5	54,34 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungstoli (Angka perhitungan sementara)	5	36,44 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (Angka perhitungan sementara)	5	46,22 Nilai		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok	5	40,99 Nilai		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.7-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		(Angka perhitungan sementara)				
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (Angka perhitungan sementara)	5	47,22 Nilai		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (Angka perhitungan sementara)	5	57,47 Nilai		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (Angka perhitungan sementara)	5	60,76 Nilai		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (Angka perhitungan sementara)	5	42,31 Nilai		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (Angka perhitungan sementara)	5	47,47 Nilai		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (Angka perhitungan sementara)	5	48,01 Nilai		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (Angka perhitungan sementara)	5	54,50 Nilai		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (Angka perhitungan sementara)	5	44,44 Nilai		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (Angka perhitungan sementara)	5	44,38 Nilai		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (Angka perhitungan sementara)	5	45,28 Nilai		
		21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (Angka perhitungan sementara)	5	46,50 Nilai		
		22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (Angka perhitungan sementara)	5	50,18 Nilai		
	02 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.01.03.03 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 Kota	92.633,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK
02.01.03.13 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota	80.936,5	Kementerian Perhubungan, DAK
02.01.03.10 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota	225.055,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.8-

FN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Iastansi Pelaksana
02.01.03.09 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	299.738,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMD (KPBU) DAK
02.01.03.05 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	269.481,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan (KPBU), DAK
02.01.03.11 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	302.948,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.01.03.04 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Bengkulu	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	89.115,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.01.03.08 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	340.857,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK, Kementerian Perhubungan (KPBU)
02.01.03.06 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	59.804,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.01.03.07 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	90.837,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.01.03.14 ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	947.341,7	Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK
02.01.03.12 ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	3.617.983,5	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, DAK, Kementerian Perhubungan (KPBU)
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.01.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	57,85 Peningkatan Nilai Indeks Desa	1.461.305,0	
		02 - Penurunan Angka Kemiskinan Desa	5	10,1 – 10,5 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.9-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	55,98 Poin IPKP		
		04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	56,59 Nilai IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	25 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,47 Nilai		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
02 01 04.29 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	18,3 - 18,8 Persen	3.378,2	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	65,6 - 66,1 Nilai Indeks		
02 01 04.36 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	14,0 - 14,5 Persen	4 232,3	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	65,2 - 65,7 Nilai Indeks		
02 01 04.15 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	20,6 - 21,1 Persen	6.859,7	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	62,7 - 63,2 Nilai Indeks		
02 01 04.19 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	11,8 - 12,3 Persen	181.569,9	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	61,1 - 61,6 Nilai Indeks		
02.01.04.07 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	55,95 Poin Indeks Desa	181 531,4	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01.04.12 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	51,89 Poin Indeks Desa	147 696,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01.04.16 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	65,37 Poin Indeks Desa	81.121,9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri
02 01 04.20 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	5	59,28 Poin Indeks Desa	63.307,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 01 04.23 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	60,06 Poin Indeks Desa	68 207,4	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.10-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.26 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	59,01 Poin Indeks Desa	151 881,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01.04.30 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	56,68 Poin Indeks Desa	49 654,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01.04.33 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	62,31 Poin Indeks Desa	103 751,0	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01.04.37 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	70,26 Poin Indeks Desa	27.713,8	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01.04.40 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	59,95 Poin Indeks Desa	26 536,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.01.04.08 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Aceh Timur	5	61,95 Poin IPKP	2 809,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.09 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	55,99 Nilai IPKT	4.848,5	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.10 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	2 Kecamatan	131 114,3	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.11 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,45 IPKP	1 750,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.01.04.13 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Toba Samosir dan Kab. Samosir	5	61,95 Poin IPKP	3 109,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.14 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	2	1 Kecamatan	125.599,5	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.17 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Agam	5	53,62 Poin IPKP	3.059,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.18	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera	5	64,05 Nilai IPKT	328,6	Kementerian Desa PDTT, Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.11-

PN/PP/KP/ProP	Basaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	Transmigrasi Lunang Silaut	Barat				Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.27 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	5	51,86 Poin IPKP	5.409,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.21 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	2	5 Kecamatan	37.361,9	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.22 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis	5	0,51 IPKP	10.039,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.01.04.24 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Muaro Jambi	5	48,86 Poin IPKP	2.959,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.25 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	32,00 Nilai IPKT	444,9	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.28 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	57,08 Nilai IPKT	2.827,4	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.31 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah	5	53,62 Poin IPKP	3.059,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.32 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	69,36 Nilai IPKT	3.904,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.34 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Mesuji dan Kab Tulang Bawang	5	50,30 Poin IPKP	3.009,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.35 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	52,94 Nilai IPKT	332,3	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.38 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	5	50,13 Poin IPKP	2.909,7	Kementerian Desa PDTT



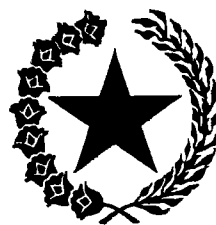
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.12-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.04.39 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	68,60 Nilai IPKT	286,1	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.01.04.41 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintang dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintang dan Karimun	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Bintang dan Karimun	5	71,55 Poin IPKP	3 359,7	Kementerian Desa PDTT
02.01.04.42 ProP Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	2	17 Kecamatan	9 489,5	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT
02.01.04.43 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,45 IPKP	5.850,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
02.01.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,08 Indeks	473 177,3	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	38 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	105 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	61 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	13286 Perizinan		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	28 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	61 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	2 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	75 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	87.500 Hektar		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	838.292,5 ha (1.676.585 bidang) Hektar		
		03 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		04 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.13-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	10 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		07 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	46 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		08 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	15 Persetujuan Substansi		
		09 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	27 Persetujuan Substansi		
		10 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
		06 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	8 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	7553 Km ²		
02.01 05 04 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	36.202,9	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02.01 05.05 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	82.284 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	107.924 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	14 747 Bidang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.14-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Istansi Pelaksana
02 01 05.06 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	18 186,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
02 01 05 07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	10 398,9	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah			
02.01 05 08 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	83 583 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	50.000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	135 809 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	73 097 Bidang		
02.01.05.09 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	7.700,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.15-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02.01.05.10 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	9 605,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.01.05.11 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	52.655 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	151.012 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.390 Bidang		
02.01.05.12 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.16-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.13 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	8 098,2	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
02.01 05.14 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	314 267 Bidang	234,9	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5.000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	188.159 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	716 Bidang		
02.01 05 15 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	01 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	5 000,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.01.05.16 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	8.094,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.17-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01 05.17 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	26.289 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Jumlah sertipikat Hak atas Tanah	5	2.500 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	33 367 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	2.805 Bidang		
02 01 05.18 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3.400,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpn, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 01 05.19 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	8.066,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.18-

PN/PP/KP/ProP	Isu/Aspek	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	di daerah					
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.01.05.20 ProP - Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	311 137 Bidang	489,3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	25 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	228 945 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.400 Bidang		
02.01.05.21 ProP - Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	01 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	1.800,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	16 Persetujuan Substansi		
02.01.05.22 ProP - Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	4.087,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya	4	359 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.19-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	daerah	meningkat				
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01 05 23 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	568 701 Bidang	289.513,3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5.000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	317 102 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.235 Bidang		
02 01 05 24 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.01 05 25 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	12.587,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.20-

FN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.01.05.26 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	165.901 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	63.703 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	16.500 Bidang		
02.01.05.27 ProP . Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	2.600,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahkan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang		
02.01.05.28 ProP . Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen	2.842,6	Kementerian Dalam Negeri
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.01.05.29 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	26.870 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	17.143 Bidang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.21-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.603 Bidang		
02.01.05.30 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 01 05 31 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 819,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 01.05.32 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	44.898 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	53.070 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.215 Bidang		
02.01 05 33 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.450,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.22-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahkan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
02.01.05.34 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	2 880 Km ²	40 000,0	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.01.05.35 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	516 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.01.05.36 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	2 699 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.01.05.37 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Lampung	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	1.458 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.02 PP : Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	4,8 - 5,5 Persen/Tahun	16 624 382,7	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	5	72,7-82,5 min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	5	7,9 Persen		
02.02.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	3 172 249,4	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	3 Jumlah Destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	2 Kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	2 Jumlah KI		
02.02.01.01 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Bandung-Halimun-Cileteuh	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1 Nilai	715.334,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.23-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
di Provinsi Jawa Barat						Perumahan Rakyat
02.02.01.03 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 Nilai	384.692,6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
02.02.01.05 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1 Nilai	353.836,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02.01.06 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1 Nilai	39.838,5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
02.02.01.07 ProP Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1 Nilai	408.779,5	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
02.02.01.08 ProP Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1 Nilai	322.895,4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02.01.04 ProP : Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1 Nilai	482.279,5	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02.01.02 ProP Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1 Nilai	230.843,3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.02.01.09 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1 Nilai	233.750,0	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.24-

FN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
di Provinsi Banten						Perumahan Rakyat (KPBU)
02.02.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 Persen	146.267,2	
02.02.02.01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	4,0 Persen	1.853,1	Kementerian Pertanian
02.02.02.02 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	4,0 Persen	17.099,0	Kementerian Pertanian
02.02.02.03 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	1,0 Persen	869,0	Kementerian Pertanian
02.02.02.04 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	5,0 Persen	10.818,9	Kementerian Pertanian
02 02 02 07 ProP Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	1,0 Persen	25.784,9	Kementerian Pertanian
02 02 02 08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	4,0 Persen	11.633,0	Kementerian Pertanian
02.02.02 10 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta	5	5,0 Persen	1.643,3	Kementerian Pertanian
02.02.02.11 ProP : Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	1,0 Persen	59.384,0	Kementerian Pertanian
02 02 02 12 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	5,0 Persen	6.064,8	Kementerian Pertanian
02.02.02.14 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	5,0 Persen	100,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.17 ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	4,0 Persen	8.753,7	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.25-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.18 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	1,0 Persen	391,5	Kementerian Pertanian
02.02.02.19 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	1,0 Persen	1 872,0	Kementerian Pertanian
02.02.02.21 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi di DKI Jakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DKI Jakarta	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.22 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.23 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat	5	4,1 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.24 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.25 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.26 ProP Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi di DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.27 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.28 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur	5	4,4 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.02.29 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.26-

PW/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.02.30 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali	5	3,1 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.02.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (Angka perhitungan sementara)	5	59 Nilai	9 664 976,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (Angka perhitungan sementara)	5	4 071 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (Angka perhitungan sementara)	5	4 208 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (Angka perhitungan sementara)	5	4.315 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (Angka perhitungan sementara)	5	4 306 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (Angka perhitungan sementara)	5	4.793 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (Angka perhitungan sementara)	5	489 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (Angka perhitungan sementara)	5	4 441 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (Angka perhitungan sementara)	4	4.608 Nilai		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (Angka perhitungan sementara)	5	7 508 Nilai		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (Angka perhitungan sementara)	5	4 234 Nilai		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (Angka perhitungan sementara)	5	5.019 Nilai		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (Angka perhitungan sementara)	5	4 468 Nilai		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (Angka perhitungan sementara)	5	4 556 Nilai		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (Angka perhitungan sementara)	5	4 365 Nilai		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (Angka perhitungan sementara)	5	4.663 Nilai		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (Angka perhitungan sementara)	5	299 Nilai		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (Angka perhitungan sementara)	4	6 194 Nilai		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (Angka perhitungan sementara)	5	5.415 Nilai		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.27-

PK/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (Angka perhitungan sementara)	5	6.656 Nilai		
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 Kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.02.03.05 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.786.724,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02.03.06 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.502.533,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Barat (KPBU), Pemda (DAK), Kementerian Perhubungan (KPBU)
02.02.03.07 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.063.756,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.02.03.08 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Barat	01 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	497.804,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.02.03.09 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	1.674.929,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMD (KPBU), Pemda (DAK)
02.02.03.10 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 Kota	358.344,3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Pemda (DAK)
02.02.03.11 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PK	5	1 Kota	499.829,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.02.03.12 ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	914.983,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.28-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Timur (KPBU), Pemda (DAK)
02 02 03 13 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	5 Kota	132 272,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Provinsi Jawa Timur (KPBU), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 02.03 15 ProP Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	415 038,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Pemda (DAK)
02 02.03.16 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	235 700,6	Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.02 03 17 ProP Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	96 692,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 02 03.18 ProP . Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	486 369,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda (DAK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.02.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	68,68 Peningkatan Nilai Indeks Desa	931 732,1	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	11,45 - 11,85 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	61,60 Poin IPKP		
	02 - Terpulihkannya daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen		
02 02 04.04 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	69,46 Poin Indeks Desa	149 673,3	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02 04 05 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	68,33 Poin Indeks Desa	190 079,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.29-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.04.06 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	77,03 Poin Indeks Desa	34.613,0	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02.04.07 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	67,27 Poin Indeks Desa	204.931,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02.04.08 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	63,29 Poin Indeks Desa	46.524,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02.04.09 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	74,08 Poin Indeks Desa	29.159,3	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.02.04.10 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sukabumi	5	47,18 Poin IPKP	3.059,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.11 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Magelang dan Kendal	5	55,97 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.12 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pamekasan dan Banyuwangi	5	72,26 Poin IPKP	5.459,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.13 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pandeglang	5	64,41 Poin IPKP	2.809,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.14 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Buleleng dan Klungkung	5	68,20 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02.02.04.15 ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Terpulihkannya pelayanan publik	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen	258.701,9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendesa PDTT
02.02.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	3,36 Nilai	2.709.157,5	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	62 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	90 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	4	47 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.30-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	8586 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	16 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	47 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	2 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	79 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	4 Daerah		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	3059 Desa		
		02 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5.000 yang diakusisi	2	15000 Km ²		
		04 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 Layanan		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	07 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		08 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	9 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		13 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap di tingkat nasional	2	2 Kasus		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	2 333.978 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.559.750 ha		
		03 - Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	5	82 Satker		
		09 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	28 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		11 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	13 Persetujuan Substansi		
		12 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	35 Persetujuan Substansi		
		04 - Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas	5	2.422 Km		
		05 - Terbentuk dan operasional lembaga bank tanah	5	1 Lembaga		
		06 - Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	5	33 Provinsi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.31-

FR/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		10 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 02 05 05 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen	42.476,2	Kementerian Dalam Negeri
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02.02.05.06 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	51.530 bidang	351.632,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	02 - Luas peta dasar pertanahan	5	1 559.750 ha		
	03 - Terwujudnya percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pertanahan yang modern	01 - Jumlah Layanan Data dan Informasi	5	82 satker		
	04 - Terwujudnya pemetaan dan perapatan batas kawasan hutan dan non hutan	01 - Panjang Batas Kawasan Hutan dengan APL dalam skala kadastral	5	2.422 km		
	05 - Terwujudnya operasional kelembagaan Bank Tanah	01 - Jumlah Lembaga Bank Tanah	5	1 lembaga		
	06 - Terwujudnya sosialisasi dan penatausahaan tanah adat/ulayat	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat	5	33 satker		
	07 - Terwujudnya percepatan pemenuhan proporsi SDM ideal (PNS Juru Ukur Bidang Pertanahan) dalam mendukung pencapaian target stelsel posirif	01 - Jumlah PNS Juru Ukur Pertanahan	5	1 500 orang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.32-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	08 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	280 bidang		
	09 - Tersusunnya data lokasi indikatif pengadaan tanah	01 - Jumlah Data lokasi indikatif pengadaan tanah	5	495 satker		
	10 - Tersusunnya basis data pengadaan tanah	01 - Jumlah basis data pengadaan tanah	5	66 satker		
	11 - Terwujudnya percepatan peta Zona Nilai Tanah	01 - Luas Peta Zona Nilai Tanah	5	3 951 110 ha		
	12 - Terwujudnya percepatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	01 - Luas Peta Tematik	5	2.115 396 ha		
02.02.05.07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 464,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.02.05.08 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	1.527.096 Bidang	1 459 788,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	629.981 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	42 069 Bidang		
02.02.05.09 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	12.342,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	7 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	5 Persetujuan Substansi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.33-

PN/PP/KP/ProP	Baeraran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02 02.05.10 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	767 Desa	812 180,5	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1 5 000 yang diakuisisi	2	15000 Km ²		
	04 - Terlaksananya layanan data center	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 Layanan		
02 02 05.11 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	4.788,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 02 05.12 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	1 516.966 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	706.084 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	145.235 Bidang		
02.02.05.13 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	5.250,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	5 Persetujuan Substansi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.34-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 02 05 14 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	771 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02 02.05 15 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 752,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02 02 05 16 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	62.038 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	20.371 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	26 510 Bidang		
02.02 05 17 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	900,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.35-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 02.05.18 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 034,2	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 02 05 19 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	1.333.558 bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah Bidang Tanah	5	512 197 bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah Bidang Tanah K4	5	46 245 bidang		
02 02.05.20 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	01 - Jumlah RPerpres RTR KSN di Provinsi Jawa Timur	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	3.200,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	2	7 Persetujuan Substansi		
	06 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	15 Persetujuan Substansi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.36-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.02.05.21 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	778 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.02.05.22 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.589,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah			
02.02.05.23 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	167 010 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	100 974 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	10.450 Bidang		
02.02.05.24 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
02.02.05.25 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Banten	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	743 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.02.05.26 ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.159,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah	4	100 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.37-**

PK/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik				
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.02.05.27 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	9 758 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	2.687 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.425 Bidang		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
	05 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	06 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	07 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	10 Persetujuan Substansi		
02 02 05 28 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.600,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.38-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dan Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	10 Persetujuan Substansi		
02.03 PP : Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	3,5 – 5,2 Persen/Tahun	32.401.036,9	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	5	66,3-69,5 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara	5	17,8 Persen		
02.03.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	1 394 982,3	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
02.03.01.01 ProP Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1 Nilai	584.991,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.03.01.02 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1 Nilai	809.991,3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU)
02.03.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	45.139,2	
02.03.02.01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	1 752,0	Kementerian Pertanian
02 03 02.02 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	4.836,8	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.39-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahana Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 03 02.03 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	12 798,5	Kementerian Pertanian
02.03.02 08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	5,0 Persen	7 156,5	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 03 02.09 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	1,0 Persen	13.745,9	Kementerian Pertanian
02 03 02 10 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	1,0 Persen	2.214,8	Kementerian Pertanian
02.03 02 11 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	5,0 Persen	789,4	Kementerian Pertanian
02 03.02.13 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	5,0 Persen	1.845,3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 03.02.14 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.03 02.15 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 03 02.16 ProP . Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.03.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara)	5	4.434 Nilai	332.410,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara)	5	4.391 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.40-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03 03 02 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	306 798,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 03 03 03 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	25 611,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.03.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Perkembangan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	56, 42 Peningkatan Nilai Indeks Desa	30.612.536,4	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	19,15 - 19,55 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	51,18 Poin IPKP		
		04 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	47,67 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Nusa Tenggara	5	4 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Nusa Tenggara	5	0,45 IPKP		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
03 - Terpuhkannya daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen			
02.03 04 02 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	4 Kecamatan	77.009,2	Kemendesa PDTT
02.03.04 11 ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	5	25,7 - 26,2 Persen	7.834,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	66,7 - 67,2 Nilai Indeks		
02 03.04.12 ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	5	25,1 - 25,6 Persen	29 843 378,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	63,2 - 63,7 Nilai Indeks		
02.03 04 14 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,41 IPKP	232.785,0	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.41-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.03.04.15 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,49 IPKP	262.974,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.03.04.16 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	51,74 Poin Indeks Desa	104.922,1	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.03.04.17 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	68,45 Poin Indeks Desa	47.216,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.03.04.18 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - 01-Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	5	53,08 Poin IPKP	11.252,9	Kemendesa PDTT
02.03.04.19 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	5	49,27 Poin IPKP	5.359,7	Kemendesa PDTT
02.03.04.20 ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Terpulihkannya pelayanan publik	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen	4.111,2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemendesa PDTT
02.03.04.21 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	56,13 Nilai IPKT	7.678,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.03.04.22 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	42,03 Nilai IPKT	8.013,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.03.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,07 Indeks	15.968,5	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	25% Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	22 Daerah		
		04 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1206 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	8 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.II.42-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggaranya penataan ruang	07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	13 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	2 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	70 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	79 005 ha (158 010 Bidang) Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	40.000 Hektar		
		03 - Persentase jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	5	25 Persen		
		04 - Jumlah Persetujuan Substansi Teknis Ranperda RTR Daerah	2	4 Persetujuan Substansi		
		05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		06 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		07 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
		08 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
		09 - Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RDTR Hasil Bantuan Teknis	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		10 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	2281 Km ²		
02 03.05.11 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 310,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.43-

PK/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 03 05 12 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2 862,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 03.05 13 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak atas Tanah	5	102 359 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	67.645 Bidang		
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - luas peta dasar pertanahan	5	40.000 Hektar		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	11.550 Bidang		
02 03.05 14 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak atas Tanah	5	55.651 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	52.072 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.920 Bidang		
02.03.05.15 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi teknis dan Raperda RTRW	4.012,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi teknis dan Raperda RDTR		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.44-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 03 05 16 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	5.782,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
	06 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02 03 05.17 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000	2	2 281 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.04 PP : Pembangunan Wilayah Kalimantan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	3,6 - 5,7 Persen/Tahun	5 451 089,6	
		02 - IPM Provinsi wilayah Kalimantan	5	69,0-77,7 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan	5	5,6 Persen		
02.04.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	609 806,2	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	2 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	2 Jumlah KI		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.45-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.01.01 ProP Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1 Nilai	308.471,6	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.01.02 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1 Nilai	125.231,1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.01.03 ProP Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1 Nilai	47.972,7	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.01.04 ProP Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1 Nilai	128.130,8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 persen	29.114,3	
02.04.02.01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	1,0 Persen	2.182,4	Kementerian Pertanian
02.04.02.02 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	4,0 Persen	8.764,2	Kementerian Pertanian
02.04.02.03 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.04.02.07 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.04.02.08 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	1,0 Persen	2.952,4	Kementerian Pertanian
02.04.02.14 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.46-

PN/PP/KP/ProP	Basaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.15 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	5,0 Persen	4.363,0	Kementerian Pertanian
02.04.02.17 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.04.02.19 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	2,0 Persen	7.455,5	Kementerian Pertanian
02.04.02.22 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.04.02.25 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	1,0 Persen	3.396,8	Kementerian Pertanian
02.04.02.26 ProP Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat	5	1,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.27 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.28 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.29 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.30 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.47-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.02.31 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.32 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.33 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	1,8 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.02.34 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.04.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (Angka perhitungan sementara)	5	4.512 Nilai	2.296.256,5	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (Angka perhitungan sementara)	5	3.954 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (Angka perhitungan sementara)	5	4.665 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (Angka perhitungan sementara)	5	3.812 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Negara (Angka perhitungan sementara)	5	3.854 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (Angka perhitungan sementara)	5	5.088 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (Angka perhitungan sementara)	5	4.736 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (Angka perhitungan sementara)	5	3.702 Nilai		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (Angka perhitungan sementara)	5	4.760 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
	05 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 Hektar		
	06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.48-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 04 03.02 ProP : Pembangunan Kota Baru di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	78 631,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02.04.03.03 ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	275 423,0	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemda (DAK), Kementerian Perhubungan
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02 04 03 04 ProP : Pembangunan Ibu Kota Negara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Negara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Negara	5	5.600 Hektar	1 181.753,2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
02.04.03.05 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	87 625,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda (DAK)
02 04 03 06 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	314 123,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemda (DAK)
02 04 03 07 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	276 496,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02.04.03 08 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	82 204,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	55,76 Poin Indeks Desa	1 799.703,3	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	6,3 - 6,8 Persen		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	48,46 Poin IPKP		
		04 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	52,59 IPKT		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Kalimantan	5	7 Kecamatan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.49-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Kalimantan	5	0,42 IPKT		
02.04.04.09 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	2	2 Kecamatan	41.485,6	Kemendesa PDTT
02.04.04.24 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	2	5 Kecamatan	11.529,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.10 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,45 Poin IPKP	458.119,4	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
02.04.04.11 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,34 IPKP	185.088,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04.12 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	53,84 Poin Indeks Desa	56.080,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.07 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	5	40,79 Poin IPKP	7.709,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.08 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	57,86 IPKT	157,9	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.04.04.06 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	52,66 Poin Indeks Desa	57.802,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.13 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	5	54,68 Poin IPKP	2.809,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.14 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	24,60 Nilai IPKT	130.494,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.50-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Nasional						
02.04.04.15 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	59,25 Poin Indeks Desa	59.908,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.16 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Barito Kuala dan Banjar	5	57,44 Poin IPKP	3.009,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.17 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	64,57 Nilai IPKT	2.501,1	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.04.04.18 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	58,66 Poin Indeks Desa	35.991,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.19 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Berau dan Kutai Timur	5	50,63 Poin IPKP	3.009,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.20 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kalorng	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kalorng	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	53,96 Nilai IPKT	10.085,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.04.04.21 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata indeks Desa	2	48,86 Poin Indeks Desa	27.846,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.04.04.22 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab Bulungan dan Nunukan	5	47,73 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02.04.04.23 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	51,30 Nilai IPKT	6.840,9	Kemendesa PDTT
02.04.04.25 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,38 IPKP	39.124,5	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04.26 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,38 IPKP	93.142,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.04.27 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,38 IPKP	205.787,9	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.51-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.04.28 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,60 IPKP	357 816,8	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.04.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3 13 Indeks	716 209,3	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	0,248 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	42 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	27 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3189,2 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	27 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	4 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	73 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	1 Daerah		
	02 - Meningkatkan pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	06 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	6 Persetujuan Substansi		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	214.819,5 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	180 000 Hektar		
		03 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	6 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		05 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
		04 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	25 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		07 - Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RDTR Hasil Bantuan Teknis	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		08 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1.5.000	2	2757 Km ²		
		02 - Jumlah luasan data geospasial skala 1 5.000 yang diakuisisi	2	400 000 Km ²		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.52-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 04 05.04 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.866,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah			
02 04 05 05 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	176.937 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	100 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	469 538 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	14.740 Bidang		
02.04.05 06 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	7 311,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.04.05.07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 202,4	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.53-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	digital (e-gov) dengan indikator					
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Umlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 04 05 08 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	101 647 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	232 676 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	8 800 Bidang		
02 04 05 09 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3.500,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.04.05.10 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 012,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.54-

PN/PP/KP/ProP	Bantuan	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.04.05.11 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	60.968 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	322.636 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	12 700 Bidang		
02.04.05.12 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3 361,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02.04.05.13 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3 008,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.04.05.14 ProP . Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	90.087 Bidang	686 090,2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	75 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	157 108 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	784 Bidang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.55-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	tanah K4					
02.04.05.15 ProP · Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.161,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.04.05.16 ProP · Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.694,7	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah			
02.04.05.18 ProP · Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
02.04.05.19 ProP · Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5.000 yang diakusisi	2	80.000 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.56-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.04.05.20 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5 000 yang diakusisi	2	80 000 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	957 Km ²		
02.04.05.21 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1 5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1 5 000 yang diakusisi	2	80 000 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02 04 05 22 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1.5 000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1:5.000 yang diakusisi	2	80 000 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1 5 000	2	1 800 Km ²		
02 04.05.23 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	01 - Jumlah luasan data geospasial skala 1 5 000 yang diakusisi	2	80.000 Km ²	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.05 PP : Pembangunan Wilayah Sulawesi	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	5,4 – 7,0 Persen/Tahun	4 555.316,6	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	5	67,0-73,9 Min- Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi	5	9,8 Persen		
02.05.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	911 618,9	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	7 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 Jumlah Destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata	5	1 Jumlah Destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 Kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 Jumlah KI		
02.05.01.01 ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1 Nilai	102 169,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU)
02 05.01 02 ProP : Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1 Nilai	207 169,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.57-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 05 01 03 ProP . Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1 Nilai	76.611,3	Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02 05 01 04 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1 Nilai	444.669,0	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan (KPBU)
02 05.01 05 ProP . Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1 Nilai	81 000,0	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
02.05.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 – 5,0 Persen	130 378,6	
02 05 02 01 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	1,0 Persen	2 451,6	Kementerian Pertanian
02.05.02 02 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	5,0 Persen	3.192,5	Kementerian Pertanian
02 05 02 03 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	4,0 Persen	4.791,0	Kementerian Pertanian
02.05.02 04 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	2,0 Persen	4 148,0	Kementerian Pertanian
02.05.02 05 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	7.072,0	Kementerian Pertanian
02 05 02.06 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	1.044,5	Kementerian Pertanian
02 05 02.07 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	6 060,0	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.58-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 05.02.08 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	2 393,6	Kementerian Pertanian
02.05 02.09 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	1,0 Persen	27.257,6	Kementerian Pertanian
02 05 02 10 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	1,0 Persen	11 644,6	Kementerian Pertanian
02.05.02 11 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	6.255,1	Kementerian Pertanian
02.05.02 12 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	1,0 Persen	1 166,0	Kementerian Pertanian
02 05 02 14 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	1,0 Persen	37.248,3	Kementerian Pertanian
02 05.02.15 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	5,0 Persen	8.541,2	Kementerian Pertanian
02.05.02 16 ProP : Pengembangan Komoditas Kopi di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	1,0 Persen	4 873,6	Kementerian Pertanian
02 05.02.17 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	2,0 Persen	2 089,0	Kementerian Pertanian
02.05.02 25 ProP : Pengembangan komoditas Unggulan Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Pertanian
02.05.02.26 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.II.59-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 05.02.27 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.28 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	2,7 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.29 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05 02 30 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05 02.030 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.31 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan	5	5,0 Persen	150,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02.33 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05.02 34 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	5	1,6 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02 05 02.35 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.02.36 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.02.37 ProP Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat	5	1,3 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.60-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Provinsi Sulawesi Barat						
02.05.02.38 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (Angka perhitungan sementara)	5	4 694 Nilai	2 146 418,7	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (Angka perhitungan sementara)	5	4 409 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (Angka perhitungan sementara)	5	4 139 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (Angka perhitungan sementara)	5	4 701 Nilai		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (Angka perhitungan sementara)	5	4 050 Nilai		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (Angka perhitungan sementara)	5	4.461 Nilai		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (Angka perhitungan sementara)	5	3 910 Nilai		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (Angka perhitungan sementara)	5	3.388 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 Kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.05.03.03 ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	369 037,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU), DAK
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.05.03.04 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	124.762,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, DAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.05.03.05 ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	992 389,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, DAK, Kementerian Perhubungan (KPBU), Kementerian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.61-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Dalam Negeri
02 05 03.06 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	65 773,1	Kementerian Perhubungan (KPB), DAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 05 03 07 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	102 695,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.05.03.08 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	248 635,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK, Kementerian Perhubungan
02 05 03 09 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	243 124,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.05.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	60,59 Peningkatan Nilai Indeks Desa	1 199 907,5	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	12,1 - 12,45 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	51,20 Poin IPKP		
		05 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	54,87 IPKT		
		02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Sulawesi	5	0,44 Poin IPKP		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
		03 - Terpulihkannya daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5		
	02 05.04.02 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	2		
02 05.04.08 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	60,37 Poin Indeks Desa	54.018,9	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.09 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Minahasa Utara	5	61,17 Poin IPKP	3.059,7	Kemendesa PDTT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.62-

PK/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.10 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,46 IPKP	30.000,0	Kementerian Perhubungan
02.05.04.11 ProP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,42 IPKP	1 500,1	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.05.04.12 ProP . Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	58,01 Poin Indeks Desa	56 505,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.13 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Morowali, Buol, dan Poso	5	46,53 Poin IPKP	5 784,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.14 ProP . Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	52,41 Nilai IPKT	17 209,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.04.15 ProP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase Penduduk Miskin di daerah tertinggal 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5 5	15,1 - 15,6 Persen 67,5 - 68 Nilai Indeks	100 314,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.05.04.16 ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Terpulihkannya pelayanan publik	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	5	75 Persen	596 008,6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendesa PDTT
02.05.04.17 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	63,14 Poin Indeks Desa	86 483,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.18 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	5	51,23 Poin IPKP	3 509,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.19 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	51,56 IPKT	30.843,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.04.20 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	57,62 Poin Indeks Desa	65 020,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.63-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.05.04.21 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	5	45,85 Poin IPKP	3.309,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.22 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	51,40 IPKT	17.924,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.04.23 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	63,48 Poin Indeks	34.131,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.24 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	5	53,89 Poin IPKP	3.309,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.25 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	59,02 IPKT	3.687,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.04.26 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	57,00 Poin Indeks Desa	31.509,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.05.04.27 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Mamuju dan Mamuju Tengah	5	45,61 Poin IPKP	3.359,7	Kemendesa PDTT
02.05.04.28 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	64,09 IPKT	16.048,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.05.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,10 Nilai EPPD	166.992,9	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	0,255 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penenmaan daerah meningkat	4	59 Daerah		
		04 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	36 Daerah		
		05 - Jumlah penzinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	4867 Izin		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.64-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	9 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	36 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	5 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	0,742116667 Persen		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	04 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR hasil bimbingan teknis	2	28,00 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	204 548,5 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	150.000 Hektar		
		03 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1,00 Materi Teknis dan Raperpres		
		10 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	9,00 Persetujuan Substansi		
		09 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	6,00 Persetujuan Substansi		
		05 - Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RDTR Hasil Bantuan Teknis	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	06 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		07 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	7 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	1275 Desa		
02 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5.000		2	614 Km ²			
08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah		01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang		
02.05.05 05 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.65-

PN/PP/KP/ProP	Besaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.05.05.06 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	48.734 Bidang	132.462,6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	46.500 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5.500 Bidang		
02.05.05.07 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	10.255,2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	05 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.05.05.08 ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	443 Desa		Badan Informasi Geospasial (BIG)
	02 - Tersusunnya Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5000	01 - Jumlah luasan informasi geospasial skala 1:5000	2	614 Km ²		
02.05.05.09 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.312,6	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.66-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	02.05.05.10 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5		
02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan		01 - Luas peta dasar pertanahan	5	100 000 Hektar		
03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang		01 - Jumlah bidang tanah	5	126.999 Bidang		
04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4		01 - Jumlah bidang tanah K4	5	11 911 Bidang		
02.05.05.11 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.05.05.12 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.619,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.67-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.05.05.13 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	127.721 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	50 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	129 075 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	53.295 Bidang		
02.05.05.14 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	5 300,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	06 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	4 Persetujuan Substansi		
	07 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	3 Persetujuan Substansi		
	04 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	2 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Tematik Arahan Prioritas Nasional	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	1 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	01 - Jumlah RPerpres RTR KSN	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
02.05.05.15 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	504 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.05.05.16 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.009,6	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.68-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.05.05.17 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	69.244 Bidang		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	102.143 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.620 Bidang		
02.05.05.18 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	5 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02.05.05.20 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.985,3	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.69-

PN/PP/KP/ProP	 Sasaran	 Indikator	 Dukungan terhadap Arah Presiden	 Target	 Alokasi (Rp. Juta)	 Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05 05 21 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	37 981 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	27 723 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3 410 Bidang		
02 05 05.22 ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	04 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 05.05.23 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	2.919,8	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02 05 05.24 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	38.100 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	23 759 Bidang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.70-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	22 240 Bidang		
02 05 05.25 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	4 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
02.05.05.26 ProP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tercapainya Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	3	328 Desa	-	Badan Informasi Geospasial (BIG)
02.06 PP : Pembangunan Wilayah Maluku	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB wilayah Maluku	5	5,2 - 6,2 Persen/Tahun	1.062.671,1	
		02 - IPM Provinsi di wilayah Maluku	5	69,9-70,5 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Maluku	5	12,8 Persen		
02.06.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	249.529,7	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 Kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 Jumlah Destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 Kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 Jumlah KI		
02.06 01 01 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1 Nilai	224.529,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.06 01.02 ProP : Fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya fasilitas realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Maluku Utara	5	>1 nilai	25.000,0	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02.06.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 - 5,0 persen	20.756,7	
02 06 02.01 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	5,0 Persen	5.483,3	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.71-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.02.02 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	5,0 Persen	1 381,8	Kementerian Pertanian
02.06.02.03 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	1,0 Persen	2 286,0	Kementerian Pertanian
02.06.02.04 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	1,0 Persen	11 605,6	Kementerian Pertanian
02.06.02.05 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.06 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.07 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.08 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (Angka perhitungan sementara)	5	6.227 Nilai	288 154,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (Angka perhitungan sementara)	5	443 Nilai		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (Angka perhitungan sementara)	5	447 Nilai		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (Angka perhitungan sementara)	5	3.791 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 Kota		
03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota			
02.06.03.11 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 Kota	169 356,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.72-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.03.12 ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara	01 - Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	32.646,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, DAK
02.06.03.13 ProP : Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya Kota Baru	01 - Jumlah Kota Baru yang dibangun	5	1 Kota	86.151,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK
02.06.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	5	51,74 Poin Indeks Desa	485.807,9	
		02 - Penurunan Angka Kemiskinan Desa	5	15,75 - 16,00 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	54,35 Poin IPKP		
		04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku	5	32,42 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Maluku	5	4 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Maluku	5	0,47 IPKP		
02.06.04.02 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	2	4 Kecamatan	29.611,3	Kemendesa PDTT
02.06.04.11 ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	5	22,2 - 22,7 Persen	263.771,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	5	64,6 - 65,1 Nilai Indeks		
02.06.04.12 ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	5	6,9 - 7,4 Persen	2.773,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Sosial
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	62,9 - 63,4 Nilai Indeks		
02.06.04.14 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,45 IPKP	70.750,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
02.06.04.15 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,48 IPKP	4.181,4	Kementerian Perdagangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.73-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.06.04.16 ProP Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	50,00 Poin Indeks Desa	52.272,0	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.06.04.17 ProP . Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	52,00 Poin Indeks Desa	49.424,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.06.04.18 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Maluku Tengah	5	50,00 Poin IPKP	6.069,7	Kemendesa PDTT
02.06.04.19 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pulau Morotai	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Morotai	5	58,70 Poin IPKP	4.959,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.04.20 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	5	40,51 Nilai IPKT	95,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.06.04.21 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	28,38 IPKT	1.898,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.06.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,89 Indeks	18.422,2	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
		03 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 Daerah		
		04 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik	4	1283,9 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 Daerah		
		07 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	4	72 Daerah		
		08 - Persentase capaian SPM di daerah	4	10 Persen		
		09 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	2 Daerah		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	1 Daerah		
	02 - Meningkatkan pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	04 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
-A.II.74-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		01 - Persentase cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	34.215,5 (68.431 bidang) Hektar		
		02 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	4 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
		03 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis	2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
		05 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02.06.05.11 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.479,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.06.05.12 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.160,5	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.75-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
02.06.05.13 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	26.336 Bidang	7.657,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	44.809 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5 642 Bidang		
02.06.05.14 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	42 095 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	26 092 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.487 Bidang		
02.06.05.15 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	2.724,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02.06.05.16 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW	1.400,0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	03 - Terlaksananya persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	2 Persetujuan Substansi		
	04 - Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	01 - Jumlah gelar perkara kasus dengan status berkas lengkap	2	1 Kasus		
02.07 PP : Pengembangan Wilayah Papua	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB wilayah Papua	5	2,6 - 5,8 Persen/Tahun	4.026.963,9	
		02 - IPM Provinsi di wilayah Papua	5	61,1-65,4 Min-Maks		
		03 - Persentase penduduk miskin wilayah Papua	5	25,5 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.76-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana		
02.07.01 KP : Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	5	>1 Nilai	459 703,4			
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	2 Kawasan				
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 Jumlah Destinasi				
		04 - Destinasi Pariwisata	5	1 Jumlah Destinasi				
02.07.01.01 ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1 Nilai	376 842,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan		
02.07.01.02 ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua Barat	5	>1 Nilai	82.860,9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan		
02.07.02 KP : Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya Sektor Unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	5	1,0 - 5,0 Persen	21.577,8			
		02.07.02.01 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua	5	1,0 Persen	4.592,0	Kementerian Pertanian
		02.07.02.02 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua	5	5,0 Persen	7.243,5	Kementerian Pertanian
		02.07.02.06 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat	5	1,0 Persen	5.893,3	Kementerian Pertanian
		02.07.02.07 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat	5	1,0 Persen	3.849,0	Kementerian Pertanian
		02.07.02.10 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat	5	5,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02.07.02.11 ProP : Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua	5	1,0 Persen	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.77-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.03 KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (Angka perhitungan sementara)	5	4 425 Nilai	437.430,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (Angka perhitungan sementara)	5	3.783 Nilai		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota		
02 07.03.01 ProP Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 Kota	135 439,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, DAK
02 07 03.02 ProP Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 Kota	301 991,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, DAK
02.07.04 KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	33,14 Poin Indeks Desa	3 005.347,3	
		02 - Penurunan angka kemiskinan desa	5	34.45 - 34.75 Persen		
		03 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	5	39,62 Poin IPKP		
		04 - Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua	5	34,59 IPKT		
	02 - Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Papua	5	11 Kecamatan		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Papua	5	0,49 Poin Indeks		
		03 - Jumlah daerah tertinggal	5	N/A Kabupaten		
02.07.04.02 ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	2	11 Kecamatan	134.393,4	Kemendesa PDTT
02.07 04 04 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	31,00 Poin Indeks Desa	182 054,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02 07.04.21 ProP Wilayah Adat Papua : Laa Pago	01 - Meningkatnya IPM di 10 Kabupaten: Kab Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawjaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	01 - Rata-rata IPM di 10 Kabupaten Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawjaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	5	48,40 Nilai Indeks	809 158,4	Kemendesa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.78-

PN/PP/EP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 07 04 22 ProP : Wilayah Adat Papua : Mee Pago	01 - Meningkatnya IPM di 6 Kabupaten: Kab Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab Intan Jaya	01 - Rata-rata IPM di 6 Kabupaten: Kab Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab Intan Jaya	5	59,30 Nilai Indeks	575 912,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 07 04 23 ProP Wilayah Adat Papua . Saireri	01 - Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	01 - Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	5	68,10 Nilai Indeks	8 818,7	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemendesa PDTT, Kementerian Kesehatan
02.07.04.24 ProP : Wilayah Adat Papua Tabi	01 - Meningkatnya IPM di 5 Kabupaten/Kota Kab Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	01 - Rata-rata IPM di 5 Kabupaten/Kota Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	5	67,60 Nilai Indeks	88.029,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
02.07.04.25 ProP Wilayah Adat Papua . Anim Ha	01 - Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	01 - Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	5	61,00 Nilai Indeks	269 942,6	Kemendesa PDTT, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, ,
02 07.04 32 ProP : Wilayah Adat Papua : Domberay	01 - Meningkatnya IPM di 11 Kabupaten/Kota Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	01 - Rata-rata IPM di 11 Kabupaten/Kota Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	5	63,30 Nilai Indeks	253 244,5	Kemendesa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian
02.07.04 29 ProP . Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,39 IPKP	54 036,0	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan
02.07.04.30 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,58 IPKP	5 860,4	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian
02 07 04 31 ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,51 IPKP	51 795,4	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan
02.07.04.26 ProP Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Jayapura dan Merauke	5	41,91 Poin IPKP	3.109,7	Kemendesa PDTT
02.07 04 33 ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Raja Ampat dan Manokwari	5	37,33 Poin IPKP	3.109,7	Kemendesa PDTT
02 07 04.27 ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	5	37,08 IPKT	4.061,2	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
-A.II.79-**

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02.07.04.34 ProP Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Weriangi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Weriangi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	30,86 IPKT	10.286,7	Kemendesa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
02.07.04.35 ProP Wilayah Adat Papua : Bomberay	01 - Meningkatnya IPM di 2 Kabupaten/Kota: Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	01 - Rata-rata IPM di 2 Kabupaten/Kota Kab Kaimana, Kab Fak-Fak	5	67,00 Nilai Indeks	482.925,7	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan
02.07.04.36 ProP : Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa	2	37,1 Poin Indeks Desa	68.608,8	Kemendesa PDTT, Kementerian Dalam Negeri
02.07.05 KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,42 Indeks	102.904,8	
		02 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	0,18 Persen		
		03 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	25 Daerah		
		04 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 Daerah		
		05 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Berbasis Elektronik	4	979 Izin		
		06 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	5	2 Daerah		
		08 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan keepakatan dan perjanjian kerjasama daerah	5	0,66675 Daerah		
		09 - Persentase capaian SPM di daerah	4	16 Persen		
		07 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	2 Daerah		
		10 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	2 Daerah		
	02 - Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	38.971 Hektar		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	5.000 Hektar		
		03 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres		
		04 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	3 Materi Teknis dan Raperda RTRW		
05 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR Hasil Bimbingan Teknis		2	6 Materi Teknis dan Raperda RDTR			
06 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota		2	1 Persetujuan Substansi			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.80-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		07 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	7 Persetujuan Substansi		
02 07 05 06 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat	01 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	1 Materi Teknis dan Raperda RTRW	3.054,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	05 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
	06 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	1 Persetujuan Substansi		
02 07 05 05 ProP Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah	5	30 792 Bidang	-	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	37 772 Bidang		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1 797 Bidang		
02 07 05 04 ProP : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	3.255,2	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Target		
	02 - Meningkatkan kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatkan persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatkan persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatkan kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.II.81-

FN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
02 07 05.07 ProP Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	8 Tugas dan Wewenang	6.552,0	Kementerian Dalam Negeri
	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	01 - Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	100 Persen		
	02 - Meningkatnya kerjasama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerjasama	4	12 Daerah		
	03 - Meningkatnya persentase pencapaian SPM di daerah	01 - Persentase pencapaian SPM di daerah	4	74,28 Persen		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	18 Persen		
	05 - Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	359 Daerah		
	06 - Meningkatnya kualitas belanja daerah	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	210 Daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	210 Daerah		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota	4	5 Regulasi		
02 07.05.08 ProP : Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah	5	8.179 Bidang	88 242,8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	02 - Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	01 - Luas peta dasar pertanahan	5	5 000 Hektar		
	03 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	22.179 Bidang		
	04 - Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.950 Bidang		
02 07.05.09 ProP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya Rancangan Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	01 - Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	2	1 Materi Teknis dan Raperpres	1,800.0	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri
	02 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW	2	2 Materi Teknis dan Raperda RTRW		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.II.82-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
	03 - Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	01 - Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR	2	3 Materi Teknis dan Raperda RDTR		
	07 - Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	01 - Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	2	6 Persetujuan Substansi		

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA ASING

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 PN : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)		2,24 Nilai	279 829 105,2	
		02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		99,00 Persen		
	02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercapai dalam Program Jaminan Sosial		85,00 Persen		
		02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		72,00 Persen		
	03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	01 - Angka Kematian Ibu (AKI)		217 Per 100 000 Kelahiran Hidup		
		02 - Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita		21,10 Persen		
		03 - Insidensi tuberkulosis		252 Per 100 000 Penduduk		
		04 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,80 Persen		
		05 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		9,00 Persen		
		06 - Nilai rata-rata hasil PISA Membaca		394 Nilai		
		07 - Nilai rata-rata hasil PISA Matematika		385 Nilai		
		08 - Nilai rata-rata hasil PISA Sains		399 Nilai		
		09 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		8,85 Tahun		
		10 - Harapan lama sekolah		13,40 Tahun		
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		68,10 Nilai		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,28 Nilai		
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		54,59 Nilai		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		35,00 Persen		
06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		45,43 Persen			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.2-

PK/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> (PT) Top 200		0 PT		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> (PT) Top 300		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> (PT) Top 500		2 PT		
		05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		41,55 Persen		
		06 - Peringkat <i>Global Innovation Index</i>		Peringkat 80-85		
03.01 PP : Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	4	70 Persen	2.972.791,8	
		02 - Persentase Provinsi/Kabupaten/ Kota yang Memanfaatkan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Unit Terpadu dalam Proses Penyusunan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	4	40 Persen		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	4	60 Persen		
		04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1	95,00 Persen		
03.01.01 KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus yang disusun untuk mempercepat cakupan administrasi kependudukan	4	1 Dokumen Pedoman Teknis	4.988,4	
03.01.01.01 ProP Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4	1.028 Inovasi	2.988,4	Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung
03.01.01.02 ProP Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah yang tertangani dalam kegiatan afirmatif	4	50 Daerah	2.000,0	Kementerian Dalam Negeri
03.01.02 KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	4	1 Sistem	1.094.134,0	



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
-A.III.3-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 01 02.01 ProP Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	4	2.500 Lembaga Pengguna	2 500,0	Kementrian Dalam Negeri
03.01.02.02 ProP : Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	01 - Jumlah <i>data base</i> kependudukan yang update	4	1 <i>Database</i>	1 091 634,0	Kementrian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.01.03 KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Terlaksananya pendampingan dan layanan terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	4	70 Persen	1 866 751,4	
		02 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	4	60 Persen		
		03 - Persentase provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan move unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	4	40 Persen		
03.01 03.01 ProP Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya sistem layanan dan rujukan terpadu	01 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan SLRT	4	300 Kabupaten/Kota	1 510.849,8	Kementrian Sosial
03 01 03.02 ProP Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan pendampingan masyarakat	01 - Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya	1	40 201 Orang	355 901,6	Kementrian Sosial
03.01.04 KP : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	01 - Meningkatkan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan	4	52 Nilai	6 918,0	
03 01.04.01 ProP : Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatkan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	4	45 Persen	270,5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.01 04 02 ProP - Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan	4	90 Persen	4 086,0	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03 01 04.03 ProP Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan	4	25 Persen	2 561,5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.02 PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4	85 Persen	149 247.430,4	
		02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	14,7 Persen		
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	11 Persen		
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif	4	5 Persen		
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	29,44 Persen		
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	4,44 Persen		
03.02.01 KP : Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah dokumen rancangan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional	1	1 Dokumen	48 796.700,0	
03 02 01 01 ProP Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan program jaminan sosial	01 - Jumlah dokumen kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Perawatan Standar	3	1 Dokumen	48 788 700,0	Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan
03 02.01 02 ProP : Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian atau naskah akademik harmonisasi peraturan perundangan terkait hubungan antar kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata kelola BPJS	1	1 Dokumen Kajian/Naskah Akademis	8.000,0	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
03.02.02 KP : Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Tersalurkannya bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	10.000.000 Keluarga Penerima Manfaat	99.343.288,9	
		02 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	5	15 600 000 Keluarga Penerima Manfaat		
		03 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan LPG 3 KG	5	31.400.000 Keluarga Penerima Manfaat		
		04 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	2	31 400.000 Keluarga Penerima Manfaat		
03.02.02 01 ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	4	15.600.000 Keluarga Penerima Manfaat	99.343.288,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.02.03 KP : Perlindungan Sosial Adaptif	01 - Tersusunnya sistem perlindungan sosial adaptif	01 - Jumlah penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	578.500 Jiwa	117.244,0	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.5-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 02 03 01 ProP : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya bantuan sosial untuk perlindungan korban bencana	01 - Jumlah penduduk terdampak bencana yang memperoleh bantuan sosial	1	284.500 Jiwa	117.244,0	Kementerian Sosial
03.02.04 KP : Kesejahteraan Sosial	01 - Terwujudnya kesejahteraan sosial	01 - Presentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	21,70 Persen	990.197,5	
		02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	16,62 Persen		
03 02 04 01 ProP : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan pemerintah	01 - Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Asistensi Rehabilitasi Sosial	1	48 000 Jiwa	391 774,0	Kementerian Sosial
	02 - Penyediaan literasi khusus bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah literasi khusus bagi penyandang disabilitas	1	47.000 Eksemplar		
	03 - Pendampingan masyarakat bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah pendamping sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	50 Orang		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1	20 Lembaga		
03.02 04 02 ProP : Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terwujudnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial tingkat lanjut	1	140 Jiwa	111 067,6	Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.02.04 03 ProP : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (<i>Long-Term Care</i>)	01 - Terlaksananya Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long-term Care</i>)	01 - Indeks Lansia Tangguh	1	59,5 Angka	5 097,0	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.02 04 04 ProP : Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Kelompok rentan yang memperoleh bantuan pemerintah	01 - Jumlah anak yang memperoleh asistensi rehabilitasi sosial	1	30.000 Jiwa	482.258,9	Kementerian Sosial
		02 - Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	1	20 000 Jiwa		
		03 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan pemberdayaan	1	2 500 Keluarga		
	02 - Pendampingan masyarakat bagi kelompok rentan	01 - Jumlah pendamping sosial bagi anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	80 Orang		
		02 - Jumlah pendamping sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	100 Orang		
		03 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1	30 Orang		
		04 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial bagi anak yang mendapatkan pengembangan kapasitas	1	10 Lembaga		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.6-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.03 PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan	01 - Angka Kematian Bayi (AKB)	1	19,5 Per 1.000 Kelahiran Hidup	17 706 123,9	
		02 - Angka Kematian Neonatal	1	12,2 Per 1 000 Kelahiran Hidup		
		03 - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)</i>	1	62,16 Nilai		
		04 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	1	8,30 Persen		
		05 - Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun / <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i>	1	24 Kelahiran Hidup Per 1000 Perempuan		
		06 - Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	1	7,80 Persen		
		07 - Insidensi HIV	1	0,21 Per 1 000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	345 Kabupaten/Kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	280 Kabupaten/Kota		
		10 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	78,00 Persen		
		11 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	80 Persen		
		12 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	90 Persen		
		13 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	59 Persen		
		14 - Persentase obat memenuhi syarat	1	83,60 Persen		
		15 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	80 Persen		
03.03.01 KP : Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	431 Kabupaten/Kota	2.269.332,1	
		02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	25,93 Persen		
03.03.01.01 ProP : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	89 Persen	2.006.346,7	Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
		02 - Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	1	100 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.7-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03 03 01 02 ProP Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>)	1	24,5 Persen	262.985,4	Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
03.03.02 KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	45 Persen	7.923 281,0	
		02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	14,5 Persen		
03 03.02.01 ProP Penurunan <i>Stunting</i>	01 - Terwujudnya penurunan <i>stunting</i>	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	70 Persen	7 923 281,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), DAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
03.03.03 KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit	01 - Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	1	45 Persen	4 459.318,2	
		02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)	1	90 Persen		
		03 - Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan	2	100 Persen		
		04 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	1	416 Kabupaten/Kota		
		05 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	80 Kabupaten/Kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	52 Kabupaten/Kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	324 Kabupaten/Kota		
03.03.03.01 ProP . Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	80 Persen	4.324.926,4	Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>Treatment Coverage</i>)	1	85 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.8-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1 000 penduduk	1	475 Kabupaten/Kota		
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	90 Persen		
		05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	88 Persen		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	190 Kabupaten/Kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	15 Desa		
03.03 03 02 ProP Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	205 Kabupaten/Kota	134 391,8	Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%	1	129 Kabupaten/Kota		
03.03.04 KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	4	35 Kabupaten/Kota	655 419,4	
03.03 04 01 ProP Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	1	50 Persen	329 384,8	Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
03 03.04 02 ProP Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas	01 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	4	35 Persen	326 034,6	Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan
03.03.05 KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	2	0 Persen	2.398.773,2	
		02 - Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	2	75 Persen		
		04 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	90 Persen		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	4	35 Persen		
		05 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	2	85 Persen		
		06 - Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	2	83 Persen		
		07 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	2	92 Persen		
03.03 05.01 ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	01 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKTP)	2	4 009 FKTP	807 265,6	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.9-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKRTL)	2	851 Persen		
		03 - Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1 dokumen		
03.03.05.02 ProP Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	01 - Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim	1	1 493 Orang	381 648,9	Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	1	4.324 Orang		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan	1	660 Orang		
		04 - Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	1	2 100 Orang		
03.03.05.03 ProP Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	01 - Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	2	264 Instalasi Farmasi	606 079,1	Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase produk alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat	2	90 Persen		
03 03 05.04 ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan	01 - Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	4	25 Sistem Informasi	282.439,4	Kementerian Kesehatan
03 03 05 05 ProP Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	01 - Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	2	83,6 SDM Pengawas	321.340,2	Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
03.04 PP : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,74 Rasio	87 192 481,5	
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya: Pendidikan Tinggi	1	0,20 Rasio		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Tes PISA: Membaca	1	33,00 Persen		
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Tes PISA. Matematika	1	30,00 Persen		
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Tes PISA: Sains	1	42,60 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.10-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	1	58,20 Persen		
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi	1	27,40 Persen		
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan: SD/MI/Sederajat	1	93,25 Persen		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan: SMP/MTs/Sederajat	1	86,53 Persen		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat	1	68,69 Persen		
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	68,06 Persen		
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	34,56 Persen		
03.04.01 KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test AKSI Membaca	1	58,2 Persen	8.604.562,5	
		02 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test AKSI Matematika	1	27,4 Persen		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test AKSI Sains	1	31,4 Persen		
		04 - Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik	1	91,05 Persen		
03.04.01.01 ProP : Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	1	214 Model Kurikulum	634.991,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen	1	213 Model Pembelajaran		
03.04.01.02 ProP Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	1	48,33 Persen	7.348.300,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.01.03 ProP Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	1	50 Persen	257.123,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.01.04 ProP Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	2	4,87 Persen	262.041,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Kementerian Agama
03.04.01.05 ProP : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi softskill dalam pembelajaran	01 - Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran	1	100 Persen	102.105,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.III.11-**

FN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.04.02 KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	1	105,5 Rasio	47 666 880,0	
		02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	1	104,48 Persen		
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	1	94,34 Persen		
		04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / SMLB / Sederajat	1	88,39 Persen		
03.04.02 01 ProP Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarannya	2	35 603 Lembaga	11.187 993,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama
03 04.02 02 ProP Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afiriasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 Persen	26.017.833,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.02 03 ProP Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang-kurangnya 100%	1	391 Kabupaten/Kota	9.616 805,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	1	317 Kabupaten/Kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	1	219 Kabupaten/Kota		
03.04.02.04 ProP Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	1	64,7 Persen	844 248,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	1	154 Kabupaten/Kota		
03.04.03 KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	13,53 Persen	14.840 995,9	
03.04.03 02 ProP Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatkan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	1	91,05 Persen	1 222.307,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	89,20 Persen		
03.04 03 03 ProP Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	01 - Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	2 266 Satuan Pendidikan	454.925,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.12-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6 797 Satuan Pendidikan		
		03 - Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	6 117 Satuan Pendidikan		
03 04 03.04 ProP Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	1	363,573 Orang	13.163.762,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.04 KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	81,19 Persen	1.481.277,4	
		02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	76,01 Persen		
		03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	74,53 Persen		
		04 - Perguruan Tinggi Terakreditasi A (PT)	1	160 PT		
03.04.04 01 ProP : Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	57 490 Sekolah/Madrasah	270.346,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03 04 04 02 ProP Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	1	8 Dokumen	1 210.930,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04.05 KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 Persen	14.598 765,7	
03.04.05 01 ProP : Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM Pendidikan	4	34 Provinsi	19 194,4	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama
03.04 05 02 ProP : Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Menguatnya strategi pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	01 - Jumlah PTN yang mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi	4	243 Lembaga	14.533.832,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03.04 05 03 ProP Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan	4	68,8 Persen	17.781,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
03 04 05 04 ProP Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	4	35 Persen	27.958,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.13-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05 PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	01 - Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha	01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	9,80 Persen	106 727,9	
		02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	Menurun		
		03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	73,50 Nilai		
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	53,13 Persen		
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	Menurun		
		06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	1	0,39 Persen		
03.05.01 KP : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	76,13 Nilai	50 069,7	
		02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	65,79 Nilai		
03.05.01.01 ProP Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,59 Persen	11.700,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh peringkat KLA	1	270 Provinsi/Kabupaten/Kota		
		03 - Jumlah daerah dengan penurunan angka perkawinan anak	1	5 Provinsi		
03.05.01.02 ProP Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	5,53 Persen	38.369,7	Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	1	100 Persen		
03.05.02 KP : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	01 - Indeks PUG Nasional	1	67,95 Nilai	31.592,6	
03.05.02.01 ProP Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan PUG	01 - Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	1	38,1 Persen	7.192,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	1	61,76 Persen		
03.05.02.02 ProP Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang	01 - Terwujudnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	40 Persen	24 400,0	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.14-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.05.03 KP : Kualitas Pemuda	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	1	81,97 Persen	25 065,6	
03.05.03.01 ProP Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	25 Persen	6.585,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	25 Persen		
03.05.03.02 ProP : Pencegahan Perilaku Beresiko	01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Angka kesakitan pemuda	1	7,43 Nilai	7 050,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03.05.03.03 ProP Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	6,86 Persen	11.430,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03.06 PP : Pengentasan Kemiskinan	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	1	38 Persen	934.860,5	
		02 - Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah	1	483 334 Rumah Tangga		
03.06.01 KP : Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	0,11 Persen	50.061,2	
		02 - Keluarga Miskin dan Rentan yang mendapatkan bantuan sosial insentif modal usaha	1	7 000 Keluarga		
03.06.01.01 ProP Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	3.328.071 KK	50.061,2	Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial
		02 - Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan modal usaha	1	7.000 Keluarga		
03.06.02 KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha	1	3.900 lembaga	86 645,5	
		02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1	2.000 orang		
03.06.02.01 ProP : Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha masyarakat miskin dan rentan	01 - Jumlah fasilitasi pengembangan usaha masyarakat miskin dan rentan	1	100 Kelompok	74.703,2	Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		02 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 Lembaga		
		03 - Jumlah Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	1	3.250 UMKM		
		04 - Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	1	10.000 UMKM		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.15-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.06.02.02 ProP Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah badan usaha yang menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan	1	150 Badan Usaha	4 422,8	Kementerian Sosial
03.06.02.03 ProP Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH Mandiri	1	100 Unit	7.519,5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya)	1	160 Unit		
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi)	1	2.000 Orang		
03.06.03 KP : Reforma Agraria	01 - Terlaksananya Reforma Agraria	01 - Luas bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria	1	1.766 315 Hektare	617 621,6	
		02 - Jumlah kepala keluarga penerima Akses RA	1	120 427 KK		
03 06 03 01 ProP Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Jumlah penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) dalam kerangka reforma agraria	1	615 Hektare	144.621,7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
03.06.03.02 ProP Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Meningkatnya kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA	01 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi	1	409.936 Bidang	224 629,4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
03 06.03.03 ProP Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	1	120 427 KK	248 370,5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
03.06.04 KP : Perhutanan Sosial	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat	1	1.000 000 ha	180.532,2	
03 06 04.01 ProP Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	1	1 000 000 Hektare	180 532,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
03.07 PP : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	48,40 Persen	21 668 689,2	
		02 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	65,28 Persen		
		04 - Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang dibina	1	150 Produk		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.16-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah prototipe dari Perguruan Tinggi	1	184 Prototipe		
		05 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	1	20 Inovasi		
		06 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI Domestik	1	2.000 Paten		
		07 - Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	1	850 Paten		
		08 - Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perkerjanya) berkualifikasi S3	1	16,00 Persen		
		09 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang ditetapkan	1	120 PUI		
		10 - Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	1	60 Lembaga/Unit Kerja		
		11 - Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	1	4 Infrastruktur		
		12 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis Perguruan Tinggi	1	5 Unit		
		13 - Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan: berbasis non-Perguruan Tinggi	1	3 Unit		
		14 - Jumlah produk inovasi dan produk Riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	1	0 Produk		
		15 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	1	15 Teknologi		
		16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	1	35 Teknologi		
		17 - Budaya dan prestasi olahraga: jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	1	2 Medali		
		18 - Budaya dan prestasi olahraga: jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i>	1	1 Medali		
03.07.01 KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	01 - Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1	1.890.345 Orang	13.621.493,8	
		02 - PT Vokasi berakreditasi A	1	10 PT		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	1.913.804 Orang		
		04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	64.224 Orang		
		05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	1	2.200.000 Orang		
		06 - Jumlah pemagangan dalam negeri (SMK)	1	1.908.367 Orang		
		07 - Jumlah pemagangan luar negeri (SMK)	1	5.437 Orang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.17-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07 01 01 ProP Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran	1	560 Sekolah	198.141,3	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		02 - Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri	1	200 Orang		
03.07.01 02 ProP Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana	1	292 SMK	9 490 364,3	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri	1	100 Lembaga		
		04 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1	2.200 000 Orang		
		03 - Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	1	8 Persen		
03 07 01 03 ProP : Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri	1	5.200 Orang	935 355,6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian
		02 - Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri	1	2.160 Orang		
		03 - Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	1	440 Orang		
		04 - Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri	1	400 Orang		
		05 - Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi	1	300 Orang		
03 07 01 04 ProP Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD	1	65 sekolah	2.641.310,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Penguatan mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar industri	1	120 PT		
03.07.01.05 ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1 890.345 Orang	356.322,0	Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.III.18-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
						Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika
03.07.02 KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional 02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1 1	23.077 Publikasi 49.178 Sitasi	2.828.284,4	
03 07 02 01 ProP Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	01 - Terwujudnya Perguruan Tinggi sebagai produsen Iptek inovasi dan pusat keunggulan	01 - Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	1	182 KI	1.517.424,0	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
03 07 02.02 ProP Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian	01 - Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian	01 - Jumlah paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat	1	10 Paten	1.287.276,4	Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
03.07.02.03 ProP Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	220.000 Orang	23.584,0	Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
03.07.03 KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Meningkatnya kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi	01 - Jumlah KI yang dimanfaatkan menjadi lisensi	5	100 Lisensi	2.970.099,5	
03 07 03 01 ProP Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya pemanfaatan Iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi <i>Flagship</i> PRN	5	0 Inovasi	1.862.593,9	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
03.07.03.02 ProP Pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Terlaksananya pengembangan <i>Research Power-House</i>	01 - Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	1	970 Orang	890.585,0	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.III.19-**

FM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahana Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.03.03 ProP Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terciptanya ekosistem inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	2	8 STP	216 920,6	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
03.07.04 KP : Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2021	1	35 Orang	2 248 811,5	
		02 - Jumlah atlet elite nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade Tokyo 2021	1	25 Orang		
03 07 04 01 ProP Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Jumlah kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka penguatan sinergitas dan tata kelola olahraga pendidikan dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah	1	3 NSPK	2 051,5	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03 07.04 02 ProP Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	35,4 Persen	44 392,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03 07 04 03 ProP Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan Olimpik di PPLP dan PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional	1	10 Persen	1 430 975,5	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase olahragawan Olimpik dan Paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional	1	30 Persen		
		03 - Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah	1	40 Event		
03 07 04.04 ProP Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan berbasis Olimpik dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	1	22 Lembaga	12.333,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga
03.07.04.05 ProP Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan olimpik/paralimpik yang bersertifikat keolahragaan	1	150 Orang	15.059,5	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah tenaga keolahragaan olimpik/paralimpik yang terbina dan berkembang	1	1 170 Orang		
03.07 04 06 ProP : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	2	32 Unit	738.700,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		03 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik	2	66 Lembaga		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.III.20-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
03.07.04 07 ProP · Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	02 - Jumlah koordinasi Pemerintah /Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Swasta dalam Kemitraan Keolahragaan	1	10 Kegiatan	5 300,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
- 4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.IV.1-**

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental		70,78 Nilai	5 757.609,5	
	02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		58,21 Nilai		
	03 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat		0,63 Nilai		
	04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama		74,60 Nilai		
	05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga		55,00 Nilai		
		02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan		22,00 Tahun		
06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		63,03 Nilai			
04.01 PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,14 Nilai	599.350,1	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	70,96 Nilai		
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	77,34 Nilai		
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	56,70 Nilai		
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	69,74 Nilai		
	02 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	01 - Indeks Kerentanan Keluarga	1	11,5 Nilai		
02 - Indeks Karakter Remaja		1	68,42 Nilai			
04.01.01 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (berdasarkan hasil survei karakter pelajar)	1	35 Persen	277 608,6	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.2-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 01 01 01 ProP: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (Bullying Free School Environment)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan pendidikan karakter	1	4.550 Satuan Pendidikan	190.170,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.01.01.02 ProP: Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	100,0 Persen	18.448,4	Kementerian Agama
04 01 01.03 ProP: Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan dan kepramukaan	1	3.232 Orang	68.990,0	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.01.02 KP: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele	4	Meningkat (<i>Baseline</i> 76,75 tahun 2019) Persen	16.376,7	
		02 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas	4	Meningkat (<i>Baseline</i> 80,32 tahun 2019) Persen		
		03 - Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat	1	Meningkat (<i>Baseline</i> 79,63 tahun 2019) Persen		
04 01 02 01 ProP: Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah instansi yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (IP) dalam rangka peningkatan kualitas kerja pelayanan publik	4	150 Instansi	13.176,7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Agama
04.01.02.02 ProP: Penerapan Disiplin, <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan penyelesaian dan penyelidikan pengaduan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku	4	120 Laporan	3.200,0	Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
04.01.03 KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	1	76,22 Indeks	138.989,2	
		02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1	33 Indeks		
04 01 03.01 ProP: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	31,46 Persen	120.437,6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.3-

FN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.03.02 ProP Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesenambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	1	50 Persen	10.601,6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
04.01.03.03 ProP Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	01 - Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (berkategori) Baik	1	8 Persen	7.950,0	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.01.04 KP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	01 - Jumlah pusat perubahan gerakan revolusi mental yang memperoleh penguatan (kapasitas)	1	20 Lembaga	41.179,7	
04.01.04.01 ProP Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan (kapasitas)	1	49 Lembaga	29.919,9	Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01.04.02 ProP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan (kapasitas)	1	20 Lembaga	11.259,8	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01.05 KP: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	01 - Terwujudnya pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	01 - Persentase rumah tangga yang menyatakan adanya peningkatan jumlah usaha baru di wilayah tempat tinggal rumah tangga dalam 6 bulan terakhir	5	Meningkat (<i>Baseline</i> 77,94 tahun 2019) Persen	27.368,8	
04.01.05.02 ProP: Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Menguatnya etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong	01 - Jumlah masyarakat yang terjaring untuk memulai berwirausaha	5	1.000 Orang	3.000,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
04.01.05.03 ProP Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terwujudnya budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah peserta kampanye penggunaan produk DN	5	1.000 Orang	15.068,8	Kementerian Perdagangan
04.01.05.01 ProP Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terwujudnya budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif	01 - Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	5	100 Koperasi	9.300,0	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.IV.4-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.01.06 KP: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara	1	100 Persen	97 827,1	
04.01.06.01 ProP Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	01 - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	1	100 Persen	66.914,0	Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Agama
04.01.06.02 ProP Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 Persen	26 092,8	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
04.01.06.03 ProP Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila	3	3 Dokumen	4 000,0	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
04.01.06.04 ProP Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	1	2 Dokumen	820,3	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
04.02 PP: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	49,36 Nilai	958.608,2	
		02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	37,79 Nilai		
		03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	40,28 Nilai		
04.02.01 KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	3,55 Persen	185.681,0	
		02 - Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	12,01 Persen		
04.02.01.01 ProP Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	01 - Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan	1	944 Satuan Pendidikan	77 078,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.5-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04 02 01 02 ProP: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	50 Persen	92 986,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Arsip Nasional Republik Indonesia
04.02.01.03 ProP Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa)	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	20 Persen	15 615,6	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia
04.02.02 KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	1	0,39 Persen	462.823,9	
		02 - Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	1	59,81 Persen		
04 02 02.01 ProP. Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah karya perfilman dan musik Indonesia	1	35 Judul	210 842,8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04 02.02 02 ProP Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50 000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	9 Festival	83 124,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02 02 03 ProP Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	30 Persen	166.056,4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02 02.04 ProP: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	1	5 Komunitas	2.800,0	Kementerian Kelautan dan Perikanan
04.02.03 KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	01 - Terwujudnya pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	1	22,33 Persen	32.273,9	
04.02 03.01 ProP. Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	1	5 Wilayah Adat	18 073,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
04 02 03 02 ProP: Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat	1	30 Lembaga	13.200,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04 02.03.03 ProP Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Persentase <i>database</i> KI Komunal yang terintegrasi pada aplikasi	1	75 Persen	1 000,0	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.6-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.02.04 KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah <i>event</i> diplomasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda	1	4 Kegiatan	96.744,1	
04.02.04.01 ProP: Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah <i>event</i> diplomasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda	1	4 Kegiatan	62.905,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.04.02 ProP: Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	01 - Jumlah SDM dan lembaga kebudayaan yang diapresiasi (Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia)	1	500 Orang	33.839,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05 KP: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase SDM kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	35 Persen	181.085,3	
04.02.05.01 ProP: Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah layanan pengelolaan dana perwalian kebudayaan	1	1 Layanan	79.360,2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05.02 ProP: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	01 - Jumlah SDM kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	1	6.056 Orang	48.473,1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05.03 ProP: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah fasilitasi pemerintah bidang kebudayaan	1	80 Kegiatan	41.000,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05.04 ProP: Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 Layanan	8.139,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.02.05.05 ProP: Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 Layanan	4.112,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.03 PP: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji 02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA	1 1	85,96 Nilai 81,00 Nilai	3.636.968,3	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.7-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.01 KP: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	1	86,42 Persen	1.075.473,8	
04.03.01.01 ProP Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Jumlah penyuluh agama yang mendapatkan kompetensi	1	79.482 Orang	787.336,7	Televisi Republik Indonesia, Kementerian Agama
04.03.01.02 ProP Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Jumlah model kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama yang berperspektif moderat dan toleran yang dikembangkan	1	5 Model	132.754,2	Kementerian Agama
04.03.01.03 ProP Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Jumlah lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam mendapat penguatan pemahaman moderasi beragama	1	1.000 Lembaga	2.000,0	Kementerian Agama
04.03.01.04 ProP Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran yang difasilitasi	1	100 Persen	147.382,9	Kementerian Agama
04.03.01.05 ProP Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah siswa madrasah yang mendapatkan penguatan pemahaman moderasi beragama	1	500 Orang	6.000,0	Kementerian Agama
04.03.02 KP: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	01 - Persentase kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	1	80 Persen	453.676,6	
04.03.02.01 ProP Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Jumlah layanan harmonisasi kerukunan umat beragama	1	6.741 Orang	39.906,4	Kementerian Agama
04.03.02.02 ProP Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan,	01 - Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN,	01 - Jumlah dialog kerukunan dengan melibatkan lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	1	2.675 Kegiatan	342.629,1	Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.8-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa					
04.03.02.03 ProP Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama	1	100 Persen	71.141,1	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama
04.03.03 KP: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	01 - Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	1	1 837 Kegiatan	109 269,4	
04.03.03.01 ProP Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Lembaga budaya bernaftaskan agama yang dibina	1	34 Lokasi	5 690,7	Kementerian Agama
04.03.03.02 ProP Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Jumlah hasil penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan dan Keagamaan	1	20 Laporan	33 071,9	Kementerian Agama
04.03.03.03 ProP Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	1	2 191 Kegiatan	70.506,8	Kementerian Agama
04.03.04 KP: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan	1	50 Persen	1.894 565,2	
04.03.04.01 ProP Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya peningkatan fasilitas pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi	1	816 957 Unit	793.615,7	Kementerian Agama
04.03.04.02 ProP Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang menerima layanan dan bimbingan perkawinan	1	127.449 Keluarga	132.912,3	Kementerian Agama
04.03.04.03 ProP Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	01 - Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	1	60 Persen	40.762,5	Kementerian Agama
04.03.04.04 ProP Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar	1	85,25 Persen	927.274,7	Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan
04.03.05 KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1	51 Persen	103.983,3	



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
-A.IV.9-

FN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.03.05.01 ProP: Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Jumlah program pengelolaan dana sosial keagamaan yang dibina dan dikembangkan	1	98 Lokasi	20.013,3	Kementerian Agama
04.03.05.02 ProP: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat	01 - Jumlah lembaga dana sosial keagamaan yang dibina	1	768 Lembaga	78.402,7	Kementerian Agama
04.03.05.03 ProP: Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase laporan keuangan haji yang akuntabel	1	100 Persen	5.567,3	Kementerian Agama
04.04 PP: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	12 Nilai	562.682,9	
04.04.01 KP: Peningkatan Budaya Literasi	01 - Terwujudnya peningkatan budaya literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1 1 1	1:15 Rasio 1:19.000 Rasio 20,45 Persen	418.680,7	
04.04.01.01 ProP: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi	1	20.161 Orang	78.022,8	Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.04.01.02 ProP: Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi	1	320 Orang	176.545,0	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.04.01.03 ProP: Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	1.048 Perpustakaan	164.112,9	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Sosial
04.04.02 KP: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	01 - Terwujudnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	1	515 Nilai	94.143,2	
04.04.02.01 ProP: Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia	1	30 Negara	27.405,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.IV.10-

PW/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahannya Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
04.04.02.02 ProP Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah kosakata Bahasa Indonesia	1	130 030 Kosakata	23.106,3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		02 - Jumlah tenaga profesional yang mahir berbahasa Indonesia	1	73 050 Orang		
04.04.02.03 ProP Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah penutur yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	1	21.132 Orang	43.631,9	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
04.04.03 KP: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	01 - Terwujudnya pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Jumlah produk riset dan inovasi yang dihasilkan siswa pendidikan menengah yang mendapat pendampingan peneliti	1	20 Produk	5 200,0	
04.04.03.01 ProP Peningkatan Budaya Riset dan Ekpermentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Terwujudnya peningkatan budaya riset dan ekpermentasi ilmiah sejak usia dini	01 - Jumlah partisipan dalam kompetisi Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan <i>National Young Inventor Award</i> (NYIA)	1	4 000 Proposal	3 000,0	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
04.04.03.02 ProP Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terwujudnya budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	01 - Jumlah layanan literasi iptek berbasis terbitan dan multimedia	1	4 Layanan	2.200,0	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
04.04.04 KP: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase institusi perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	0,35 Persen	44 659,0	
04.04.04.01 ProP Pengembangan Mitra Perpustakaan (Library Supporter)	01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (<i>library supporter</i>)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	500 Perpustakaan	14.714,9	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.04.04.02 ProP Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah pojok baca digital di daerah	1	160 Lokasi	29.944,1	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Keterangan

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
1) Pembangunan SDM
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Penyederhanaan Regulasi
4) Penyederhanaan Birokrasi
5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 PN : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		62,32 Persen	115.290.727,8	
		05 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10 000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010		55 Persen		
		07 - Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi		6,5 Persen, Kumulatif		
		10 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku		33,7 Persen, Kumulatif		
	02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau		2,20 Jam/100 Km		
		04 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>)		25 Persen		
	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 (berlanjut) Kota		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio elektrifikasi		- 100 Persen		
		02 - Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik		1 203 kWh/Kapita		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh Jaringan Bergerak Pitalabar (4G)		98 Persen		
05.01 PP : Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	01 - Rasio KPR terhadap PDB	2	3,10 Persen	57.507.188,2	
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	2	92,67 Persen		
		03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	2	81,99 Persen		
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	2	92,81 Persen		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	2	8,40 Persen		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	23,54 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.2-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	2	69,27 Persen		
		05 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	79,43 Persen Layak, Termasuk 10 Persen Aman		
		06 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	4,46 Persen		
		07 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	2	73,70 Persen Penanganan dan 5,51 Persen Pengurangan		
	03 - Meningkatkan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	173 Kabupaten/Kota		
	04 - Meningkatkan layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	27 Menit		
	05 - Meningkatkan optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	53,53 m ³ /kapita, Kumulatif		
		02 - Persentase luas sawah beririgasi	2	54 Persen		
		03 - Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi	2	398 123 Hektar		
05.01.01 KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	01 - Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun	2	223 180 Unit	6,952,223,3	
		02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	2	85 000 Rumah Tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan	2	197 496 Rumah Tangga		
		04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian	2	152.510 unit		
		05 - Jumlah pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	2	5 779 Hektar		
05.01.01.01 ProP : Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru	01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah	2	18.417 Unit	3 136.009,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.01.02 ProP : Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP)	2	197.496 Rumah Tangga	25.600,0	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	2	85 000 Rumah Tangga		
05.01.01.03 ProP : Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah	01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	2	150 300 Rumah Tangga	2.461.547,9	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.3-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.01.04 ProP : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar	2	40.000 Unit	288.812,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.01.05 ProP Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	49 Kabupaten/Kota	116.970,2	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.01.06 ProP Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh	01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	5 779 Hektar	923 283,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.02 KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional	2	62 352 Sambungan Rumah (SR)	12 854 892,1	
		02 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman	2	284.145 Sambungan Rumah (SR)		
		03 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	2	1.730 314 Rumah Tangga (RT)		
		04 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan <i>standar sanitary landfill</i>	2	3 383.023 Rumah Tangga (RT)		
		05 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R	2	255 938 Rumah Tangga (RT)		
		06 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	2	164 717 Rumah Tangga (RT)		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja	2	87 Kab/Kota		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik	2	83 Kab/Kota		
		09 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	16 402.000 Sambungan Rumah (SR)		
		10 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan	2	48.273.000 Rumah Tangga (RT)		
		11 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	5.854 000 Rumah Tangga (RT)		
		12 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	75 Persen		
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka	2	4,46 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.V.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 01 02 01 ProP Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	2	500 Liter/detik	12 120.419,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMD (KPBU), Provinsi Jawa Timur (KPBU), Provinsi Jawa Barat (KPBU)
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	2.334 Liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	451 725 Sambungan Rumah (SR)		
		04 - Persentase <i>Non-Revenue Water</i> (NRW) PDAM	2	30 Persen		
		05 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional	2	28 Kab/Kota		
		06 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman	2	168 Kab/Kota		
		07 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2	50 Kab/Kota		
		08 - Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru	2	56 Kab/Kota		
		09 - Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R	2	108 Kab/Kota		
		10 - Jumlah kab/kota yang memiliki TPST	2	13 Kab/Kota		
05 01 02.02 ProP Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Persentase PDAM yang memiliki business plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	25 Persen	725.663,4	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase PDAM dengan Tarif <i>Full Cost Recovery</i>	2	63 Persen		
		03 - Persentase pengelola/operator air minum berkemampuan sehat (PDAM, UPTD, KPSPAMS dll)	2	40 Persen		
		04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 Provinsi		
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 Provinsi		
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	55 Persen		
05.01 02 03 ProP Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	2	34 Provinsi	2 500,0	Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang disusun	2	0 NSPK		
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang disusun	2	5 NSPK		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.5-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 Kab/Kota		
		05 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM	2	514 Kab/Kota		
05.01 02 04 ProP Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	2	102 Kab/Kota	6 308,8	Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 Kab/Kota		
		03 - Jumlah kab/kota yang memiliki effluent IPAL, IPLT, dan leachate TPA yang memenuhi syarat (kab/kota)	2	33 Kab/Kota		
05.01.03 KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	87,37 m ³ /Detik	1.199.775,9	
		02 - Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	2	50,4 Persen		
05 01.03 01 ProP Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan debit air baku	2	3,5 m ³ /Detik	1 060 833,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01 03 02 ProP Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	01 - Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)	2	4 Dokumen	17 232,6	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui	2	19 Dokumen		
05.01.03.03 ProP Pengembangan SISDA Terpadu Berbasis Teknologi Cerdas (<i>Smart Water Management</i>)	01 - Terlaksananya pengembangan SISDA terpadu berbasis teknologi cerdas (<i>smart water management</i>)	01 - Persentase kesiapan pengembangan SISDA terpadu berbasis <i>smart water management</i>	2	20 Persen	121 709,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.04 KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10 000 pelayaran	2	1,25 Nilai	2.053 253,5	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,1 Nilai		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,25 Nilai		
05 01 04.01 ProP Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi & SAR	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	79 Paket	1 915.222,1	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU), Badan SAR Nasional
		03 - Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan	2	33 Provinsi		
		04 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 Provinsi		
		05 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	23 Lokasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.6-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.01.04.02 ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	5 000 Orang	138.031,4	Kementerian Perhubungan, Badan SAR Nasional
		02 - Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi	1	45 641 Orang		
	02 - Jumlah pelaksanaan Promosi Keselamatan Jalan Nasional	01 - Promosi Keselamatan Jalan Nasional	1	33 Provinsi		
05.01.05 KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir (<i>baseline</i> : 2019:12,6%)	2	0 persen	8 169 878,1	
		02 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut (<i>baseline</i> : -96,7%)	2	0 persen		
		03 - Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api (<i>baseline</i> 2019.-88,8%)	2	0 persen		
05.01.05.01 ProP Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	6 Wilayah Sungai	81.560,9	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami	2	1 Provinsi		
05.01.05.02 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	20 Wilayah Sungai	7 757 672,1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	5 Provinsi		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	15 Kawasan Pesisir		
05.01.05.03 ProP Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	6 Kab/Kota	35.765,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	10 CAT		
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	2 Wilayah Sungai		
		04 - Jumlah lokasi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor	2	4 Lokasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.7-

FN/FP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	58 Kegiatan		
05.01 05 04 ProP : Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alam	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	8 Unit	294.879,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01.06 KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	01 - Terbangunnya waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	15,1 Miliar m ³ , Kumulatif	26.277.165,3	
		02 - Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	2	15 Unit, Kumulatif		
		03 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	2	2 Unit		
		04 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	9 Daerah Irigasi		
		05 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	26 000 Hektar		
05 01 06 01 ProP Perencanaan Pengembangan Bendungan Multiguna dan Pemanfaatan Tampungan Alam	01 - Terlaksananya perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	01 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	2	6 Dokumen	31.540,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.01 06 02 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	14 Unit	16.693.508,5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01 06 03 ProP . Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	15 Unit	1 193 837,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		03 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	26 MW		
05.01.06.04 ProP Peningkatan OP dan Keamanan Bendungan	01 - Terlaksananya peningkatan OP dan keamanan bendungan	01 - Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun	2	2 Unit	142.916,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 01 06.05 ProP Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	25.000 Hektar	5 388 494,7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	250.000 Hektar		
05.01 06.06 ProP : Peningkatan Pengelolaan Alokasi Air dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi	01 - Terlaksananya peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	01 - Jumlah dokumen peningkatan pengelolaan alokasi air	2	42 Dokumen	2.295.950,9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah kelembagaan irigasi yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	2	18 Unit		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.8-

PN/PP/KP/ProP	Basaran	Indikator	Dukungan tbd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 01 06 07 ProP : Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi	01 - Terlaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	01 - Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi bernirgasi	2	1 000 Hektar	530 916,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.02 PP : Infrastruktur Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi	2	339,8 Km	33 560 454,2	
		02 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	919,85 Km		
		03 - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	2	6.293 Km		
		04 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	2 Lokasi		
		05 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	26 Rute		
		06 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun	2	20 Pelabuhan (6 Selesai, 14 Berlanjut) Lokasi		
		07 - Jumlah bandara baru yang dibangun	2	12 (Berlanjut) Lokasi		
		08 - Jumlah rute jembatan udara	2	31 (Berlanjut) Rute		
		09 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota	2	93/69,5/58,5 Persen		
		10 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	2	83 Persen		
05.02.01 KP : Konektivitas Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	01 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	2	3 Lokasi (Dukungan APBN)	20 358 372,1	
		02 - Panjang jalan pada kawasan prioritas yang dibangun	2	679 Km		
05.02 01 01 ProP . Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	01 - Panjang jalan lintas utama pulau ditangani	2	633,6 Km	10 159.881,1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KPBU), Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		02 - Panjang jembatan lintas utama pulau ditangani	2	6 125,8 Meter		
05 02 01 02 ProP Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	01 - Panjang jalan tol yang dibangun (dukungan APBN)	2	3 Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KPBU)
05.02.01.03 ProP Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	01 - Panjang jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN) yang ditangani	2	147,8 Km	4.197.963,5	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
05 02.01.04 ProP : Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	01 - Panjang jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	33,6 Km	199.922,2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.9-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 02 01.05 ProP Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	509 Km	5.159.817,4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 02.01 06 ProP : Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah	01 - Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	01 - Panjang jalan daerah yang dibangun	2	38,28 Km	524.836,5	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		02 - Panjang jembatan daerah yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	2	952,4 Meter		
05 02 01 07 ProP . Pengembangan Wilayah Suramadu	01 - Terlaksananya pengembangan wilayah Suramadu	01 - Luas lahan wilayah Suramadu yang dikembangkan	2	0,06 Km ²	115.951,4	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
		02 - Panjang jalan wilayah Suramadu yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan	2	8,7 Km		
		04 - Jumlah kawasan yang di pelihara	2	0,09 Km ²		
05.02.02 KP : Konektivitas Kereta Api	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Jumlah jalur kereta api yang dibangun	2	6 Lokasi	4.208.975,1	
05.02 02.01 ProP Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah jalur kereta api antarkota yang dibangun	2	4 Lokasi	1.169.926,9	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU)
05 02 02 02 ProP Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	01 - Jumlah jalur kereta api yang ditingkatkan dan dipelihara	2	8 Lokasi	2.408.135,5	Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	1 Paket		
05.02 02.03 ProP Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	01 - Terlaksananya pembangunan KA akses pelabuhan dan bandara	01 - Jumlah KA akses pelabuhan dan bandara yang dibangun	2	2 Lokasi	400.877,8	Kementerian Perhubungan
05 02 02.04 ProP Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia	2	9 Lintas	230.034,9	Kementerian Perhubungan
05.02.03 KP : Konektivitas Laut	01 - Terwujudnya konektivitas laut	01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	2	19 Lokasi	3.659.326,5	
		02 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	26 Rute		
		03 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	113 Rute		
		04 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 Rute		
		05 - Jumlah sarana transportasi laut yang dibangun	2	39 Unit		
05.02 03 02 ProP Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	17 Lokasi	1.152.895,3	Kementerian Perhubungan
05 02 03 03 ProP Pelabuhan Mendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	01 - Terbangunnya Pelabuhan Pendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	01 - Jumlah pelabuhan pendukung kawasan pariwisata prioritas	2	2 Lokasi	342.320,8	Kementerian Perhubungan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.10-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05.02.03.04 ProP Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	184 Rute	1.777.587,7	Kementerian Perhubungan
05.02.03.05 ProP Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	01 - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasana transportasi laut	01 - Jumlah kapal negara yang dibangun	2	39 Unit	382.332,4	Kementerian Perhubungan
05.02.03.06 ProP Pengembangan Teknologi Informasi Pelayaran	01 - Terlaksananya pengembangan teknologi informasi pelayaran	01 - Jumlah teknologi informasi pelayaran yang dikembangkan	2	22 Unit	4.190,3	Kementerian Perhubungan
05.02.04 KP : Konektivitas Udara	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Penyediaan layanan jembatan udara	2	1 Paket	3.451.200,6	
		02 - Jumlah bandara pendukung konektivitas udara yang dikembangkan	2	12 Lokasi		
		03 - Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya	2	64 Lokasi		
		04 - Penyiapan bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) yang dibangun	2	1 Lokasi		
05.02.04.01 ProP Jembatan Udara	01 - Terlaksananya penyediaan subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	01 - Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM pendukung jembatan udara	2	31 Rute	544.792,4	Kementerian Perhubungan
		02 - Terlaksananya pengembangan bandar udara pendukung jembatan udara	2	10 Lokasi		
05.02.04.02 ProP Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dikembangkan	2	12 Lokasi	1.236.567,3	Kementerian Perhubungan
05.02.04.03 ProP Pengembangan Bandara Hub Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara hub primer	01 - Jumlah bandara hub primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	64 Lokasi	1.667.840,9	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan (KPBU)
05.02.04.04 ProP Pembangunan Bandara Perairan (<i>Waterbased Airport</i>) untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya penyusunan kajian penyiapan pembangunan perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah kajian penyiapan bandara perairan	2	1 Dokumen	2.000,0	Kementerian Perhubungan
05.02.05 KP : Konektivitas Darat	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	41 Lokasi	1.882.579,9	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara dibangun	2	7 Lokasi		
		03 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	234 Lintas		
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	307 Lintas		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-A.V.11-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 02 05 01 ProP : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	30 Lokasi	886 369,5	Kementerian Perhubungan
05 02.05.02 ProP : Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	7 Lokasi	179 216,0	Kementerian Perhubungan
05.02.05 03 ProP : Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru	01 - Terlaksananya pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	01 - Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun	2	6 Unit	174.330,5	Kementerian Perhubungan
05 02 05 04 ProP : Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	234 Lintas	642.663,9	Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	307 Lintas		
05.03 PP : Infrastruktur Perkotaan	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass	2	5 Kota	6 489 802,4	
05.03.01 KP : Transportasi Perkotaan	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dikembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan	2	2 Perkotaan	6.192 574,8	
05.03 01 01 ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Jumlah kota yang dibangun angkutan massal berbasis rel	2	2 Perkotaan	1.791 382,5	Kementerian Perhubungan
05.03.01.02 ProP : Pembangunan Fasilitas Alih Moda yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman dan Fasilitas Umum pada Simpul- simpul Transportasi	01 - Terlaksananya pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	01 - Jumlah fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun	2	7 Lokasi	259 000,0	Kementerian Perhubungan
05.03 01 03 ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	01 - Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum massal di perkotaan besar Lainnya	01 - Jumlah perkotaan yang dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel yang dibangun	2	1 Perkotaan	2.702.077,3	Kementerian Perhubungan
05.03 01.04 ProP : Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	01 - Panjang perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	2	2 Lokasi	495.421,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05 03 01 05 ProP : Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani	2	39 Km	444 693,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Panjang jembatan perkotaan yang ditangani	2	10 Meter		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.12-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Panjang <i>fly over</i> dan <i>underpass</i> di perkotaan yang dibangun	2	1.241 Meter		
05 03 01 06 ProP Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	10 Paket	500 000,0	Kementerian Perhubungan
05.03.02 KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	16,25 Persen (Kumulatif)	45.181,8	
05 03.02 01 ProP Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK Perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	11 000.000 Rumah Tangga (Kumulatif)	45.181,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		02 - Jumlah kota/kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan kota/kabupaten yang berada di sekitar kawasan IKN yang difasilitasi menyusun masterplan <i>smartcity</i>	2	51 Kab/Kota (Kumulatif)		
05.03.03 KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal	2	7 Kab/Kota	252 045,8	
05 03.03.01 ProP Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang handal dan terintegrasi	01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	2	4 BUMD Air Minum/PDAM	252 045,8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah PDAM yang menerapkan <i>Smart Grid Water Management</i>	2	3 BUMD Air Minum/PDAM		
05.03.04 KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	01 - Jumlah pengurangan kawasan kumuh di perkotaan	2	0 Kawasan	-	
05.03.04 01 ProP Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan	01 - Jumlah peremajaan permukiman kumuh di perkotaan	2	0 Kawasan	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
05.04 PP : Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah Produksi Tenaga Listrik	2	359.946,10 GWh	2 972.608,8	
		02 - Nilai penurunan emisi CO ₂ pembangkit	2	4,92 Juta Ton		
		03 - Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota-Kumulatif	2	1.470.506 SR		
		04 - Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif	2	1.151.000 <i>Barrel per Calendar Day</i> /BPCD		
05.04.01 KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	01 - Penurunan Intensitas Energi Final	2	0,9 SBM/Miliar Rupiah	272.118,2	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.V.13-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	2	15 Persen		
05.04.01.01 ProP Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	01 - Kapasitas Terpasang EBT Tambahan	2	1001,1 MW	272.118,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Susut jaringan	2	9,01 Persen		
05.04.02 KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - <i>System Average Interruption Duration Index</i> (SAIDI)	2	10 Jam/Pelanggan	2 137 002,3	
		02 - Jumlah penyediaan gas	2	185 530 Setara Barel Minyak (SBM)		
05.04.02.01 ProP Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Terlaksananya Perluasan Jaringan Gas Kota	01 - Pembangunan Jaringan Gas Kota-APBN(SR)	2	120 776 SR	1 237.495,0	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
05.04.02.02 ProP Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah pelanggan listrik	2	79 187 Ribu Pelanggan	899 507,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah penambahan penyalur BBM Satu Harga	5	76 Penyalur		
05.04.03 KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah cadangan operasional BBM	2	23 Hari	563 488,3	
	02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi-kumulatif	2	15 800 Km		
05.04.03.01 ProP Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	2	6 446 MW	558 141,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah kebijakan peningkatan tata kelola ketenagalistrikan	2	3 Regulasi/Rekomendasi		
05.04.03.02 ProP Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif)	2	1.151 Ribu BOPD	537,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
05.04.03.03 ProP Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	01 - Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan	2	2.219 Km	4 809,9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
05.05 PP : Transformasi Digital	01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK	2	8,80 Persen	14 760.674,2	
		02 - Persentase pengguna internet	2	74,20 Persen		
		03 - Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	1	72 Persen		
05.05.01 KP : Penuntasan Infrastruktur TIK	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase wilayah berpemukiman yang mendapatkan akses seluler (4G)	2	98,5 Persen, Kumulatif	12 295 478,0	
		03 - Persentase rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	2	10 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
-A.V.14-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	2	0,4 Persen		
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	91 Persen		
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2	60 Persen		
		02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	37,15 Persen, Kumulatif		
05 05 01 01 ProP Pengembangan Infrastruktur Pitalabar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalabar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	2417 Desa, Kumulatif	10.874.212,1	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika KPBU
05 05 01 02 ProP Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital	2	10 Unit	729 471,1	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
05 05 01 03 ProP Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	01 - Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/ <i>Government Network</i>)	2	15 Persen	691 794,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05.05.02 KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,5-5,7 Persen	360 954,5	
		02 - Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	4	60 Persen		
05 05 02.01 ProP Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform	4	15 Aplikasi	36.954,5	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05.05 02.02 ProP Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah penambahan <i>unicorn</i> baru	5	0 <i>Unicorn</i> Baru	324.000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa PDTT
05.05.03 KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital	1	12.000.000 Peserta	2.104.241,7	
05.05.03.01 ProP Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1	150.000 Konten Negatif	843 889,8	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05.05.03.02 ProP Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	5	12 000.000 Orang	1 174 000,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.V.15-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan thd Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
05 05 03.03 ProP Pengembangan dan Fasilitas Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK	01 - Layanan Penggunaan Frekuensi Radio	5	1 Layanan	86.351,9	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional.
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota,
- 3) Rincian pada masing-masing Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
- 4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VI.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Peleaksana
06 PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		68,96 Nilai	12 284 432,0	
	02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB		0,69 Persen		
	03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	01 - Persentase penurunan emisi GRK		23,55 Persen		
02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK			23,40 Persen			
06.01 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	5	55,20 Nilai	3 276 219,0	
		02 - Indeks kualitas Air Laut (IKAL)	5	59,00 Nilai		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,20 Nilai		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	5	62,50 Nilai		
06.01.01 KP: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1 141 Lokasi	1 967 279,4	
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	2 625 Perusahaan		
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 Juta Ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dan <i>baseline</i>	5	2,0 Persen		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 Juta Ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perakaran	5	24,6 Juta Ha		
		07 - Akurasi informasi meteorologi	5	77 Persen		
		08 - Akurasi informasi klimatologi	5	76 Persen		
06 01 01 01 ProP Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	25 Unit	395 571,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, DAK
		02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	200 Unit		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.VI.2-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	34 Provinsi		
06 01.01 02 ProP Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	2 625 Badan Usaha	13.852,5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	2 625 Badan Usaha		
		03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	25 Pelabuhan		
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	85 Badan Usaha		
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	350 Badan Usaha		
		06 - Jumlah lokasi pengawasan terhadap <i>effluent</i> IPAL, IPLT, dan <i>leachate</i> TPA	5	33 Kab/Kota		
06 01 01 03 ProP Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Persentase informasi meteorologi yang berkualitas	5	87 Persen	419 760,5	BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
		02 - Persentase informasi klimatologi yang berkualitas	5	79 Persen		
06.01.01.04 ProP Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	1 200 Desa	247 861,6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
		02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	100 KHG		
06 01 01 05 ProP: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1	730 Unit	21.083,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	5 Produk		
06.01.01.06 ProP: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas kawasan konservasi	5	27 Juta Ha	260 616,2	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
		02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	12.500.000 Hektar (Kumulatif)		
		03 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	22 Unit		
		04 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 Juta Ha		
06.01.01.07 ProP Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	5	18.000.000 Hektar	608 534,4	Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VI.3-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.02 KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	5	67,1 Juta Ton	257 750,1	
		02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i>	5	30 Persen		
		03 - Jumlah limbah B3 yang dikelola	5	98,68 Juta Ton		
		04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari <i>baseline</i> 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,032 Persen		
06 01 02 01 ProP: Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertangannya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	2	30 Unit	55.000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
		02 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	11 Lokasi		
06 01 02 02 ProP: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	16,4 Juta Ton	30 750,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,7 Juta Ton		
06 01 02 03 ProP: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	10 Persen	21.600,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	10 Unit		
06 01 02 04 ProP: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	2	2 Unit	150 400,1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	2	7 Unit		
06.01.03 KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	310 000 Hektar	825.031,9	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	305.000 Ton		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	6 Lokasi		
		04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 Jenis		
06.01.03.01 ProP: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300 000 Hektar	257.150,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	5	10.000 Hektar		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.VI.4-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.01.03.02 ProP: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.060 Hektar	187.429,5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan	5	270.000 Ton		
		03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan noninstitusi yang terpulihkan	5	35 000 Ton		
06.01.03.03 ProP: Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	6 Lokasi	6 000,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
06.01.03.04 ProP: Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	5	1,8 Juta Ha	127.908,8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
06.01.03.05 ProP: Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	5	29,5 Juta Ha	246 543,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
06.01.04 KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	60 Persen	226.157,6	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	387 Kasus		
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	1 900.000 Hektar		
		04 - Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	7 Daerah		
06.01.04.01 ProP: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	30 KLHS	18 749,3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
06.01.04.02 ProP: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	1 500 Badan Usaha	105 109,7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
		02 - Jumlah provinsi dan kab/kota yang mampu menerapkan sistem izin lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS	3	50 Provinsi/Kab/Kota		
		03 - Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	5	105 Operasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VI.5-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06 01 04 03 ProP Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	200 Perkara	102 298,6	Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	102 Perkara		
06.02 PP: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,10 Persen	4 591 279,8	
		02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	0,59 Persen		
		03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	4,50 Menit		
06.02.01 KP: Penanggulangan Bencana	01 - Meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	0,47 Rasio	1 991 650,0	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	92 Persen		
06.02.01.01 ProP: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 Layanan	326 408,7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Kemendesa PDTT
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 Kegiatan		
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 Kegiatan		
06 02 01 02 ProP: Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 Kajian	5.165,2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Keuangan
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 Sistem		
06.02.01.03 ProP Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	225 Kab/Kota	106 511,8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	70 Persen		
06.02.01.04 ProP. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	2	50 Kajian	11.609,1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana	5	55 Dokumen		
06.02.01.05 ProP: Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,2 Jiwa	432.524,6	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Persentase waktu respon penanganan darurat kurang dari 24 Jam	1	100 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.VI.6-**

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06 02 01 06 ProP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	75 Persen	19 659,2	Kemendesa PDTT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 Persen		
06 02 01 07 ProP Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana (MHEWS) Terpadu	2	1 Sistem	1 089 771,4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 Kelompok		
		03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana	1	514 Kab/Kota		
		04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0044 Indeks		
06.02.02 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,412 Persen	2.599 629,8	
		02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,028 Persen		
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,107 Persen		
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,044 Persen		
06 02 02 01 ProP Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatkan ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	8 Kawasan	1 278 502,2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
		02 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	31 Km		
06 02 02 02 ProP Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatkan ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	56 000 Hektar	1 197 320,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
06 02 02 03 ProP Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	1 275 Orang	84 613,0	BMKG, Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah teknologi adaptasi perubahan iklim	5	1 Teknologi		
06.02.02.04 ProP: Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatkan ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS)	3	220 Kab/Kota	39 194,2	Kementerian Kesehatan
06.03 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi	5	14,06 Persen	4 416 933,2	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VI.7-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan	5	35,11 Persen		
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah	5	6,89 Persen		
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU	5	4,18 Persen		
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan	5	6,60 Persen		
06.03.01 KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional	5	14,5 Persen	643 866,9	
		02 - Intensitas energi primer	5	138 SBM/Rp Miliar		
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,9 SBM/Rp Miliar		
06.03.01.01 ProP Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	1001,1 MW	635 760,3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Pemanfaatan biofuel untuk Domestik	5	10,2 Juta Kiloliter		
06.03.01.02 ProP Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya	5	2 Peralatan	8 106,6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
06.03.02 KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	310 000 Hektar	2 663 456,5	
		02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	434 000 Hektar		
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	5	70 Persen		
06.03.02.01 ProP Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300 000 Hektar	240 150,4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	5	10 000 Hektar		
06.03.02.02 ProP Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	434.000 Hektar	808 056,0	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
06.03.02.03 ProP Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Laju deforestasi	5	430 000 Hektar/Tahun	346 450,7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
06.03.02.04 ProP Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	100 000 Hektar	1 268 799,4	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.VI.8-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahannya Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
06.03.03 KP: Pengelolaan Limbah	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	67 Juta Ton	1 059.948,3	
06.03.03.01 ProP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	16,4 Juta Ton	1.059.948,3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,7 Juta Ton		
06.03.04 KP: Pengembangan Industri Hijau	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	5	9 Persen	4 250,0	
06.03.04.01 ProP: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi yang lebih hijau	01 - Laporan penanganan masalah limbah B3 melalui standarisasi, <i>circular economy</i> dan pedoman	5	2 Laporan	4 250,0	Kementerian Perindustrian
06.03.05 KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	5	1 650 Hektar	45 411,5	
06.03.05.01 ProP: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	5	6 Lokasi	45 411,5	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keterangan

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.1-

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 PN : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		77,72 Nilai	31.906.974,1	
		02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah		65 Persen		
	02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional		96 Nilai		
	03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,67 Nilai		
	04 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola	01 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas K/L		75 Persen		
		02 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas Provinsi		60 Persen		
03 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas Kabupaten/Kota			35 Persen			
05 - Terjaganya stabilitas keamanan nasional	01 - Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi		100 Persen			
07.01 PP : Konsolidasi Demokrasi	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	3 Dokumen	680.474,8	
07.01.01 KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Skor IDI variabel kapasitas lembaga demokrasi	4	75,35 Nilai	130.376,4	
07.01.01.02 ProP : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Terwujudnya penguatan peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah penyusunan UU bidang politik yang lebih komprehensif	3	2 UU	1.100,0	Kementerian Dalam Negeri
07.01.01.03 ProP Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah peningkatan bantuan keuangan partai politik	3	126.376.418 Suara Sah	126.376,4	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.2-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 01 01.04 ProP Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik	1	50 Orang	700,0	Kementerian Dalam Negeri
07 01 01 05 ProP Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	3	15 Provinsi	2 200,0	Kementerian Dalam Negeri
07.01.02 KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	01 - Terlaksananya penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Skor IDI variabel kebebasan	3	82,50 Nilai	72.994,0	
		02 - Skor IDI variabel kesetaraan	3	77,90 Nilai		
		03 - Indeks Kerawanan Pemilu	3	45 Nilai		
07 01 02 01 ProP : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terlaksananya pendidikan politik dan pendidikan pemilih	01 - Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Pengawasan Partisipatif di 549 Satker (Nasional, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota)	1	549 Satker	58 266,3	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
07.01.02 02 ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	01 - Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan sinergis	01 - Jumlah pelaksanaan pemilu yang akuntabel dan sinergis di daerah	1	2.100 Daerah	13 427,7	Komisi Pemilihan Umum
07 01 02.03 ProP Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	1	200 Orang	1 300,0	Kementerian Dalam Negeri
07.01.03 KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01 - Meningkatkan kualitas komunikasi publik	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	71 Persen	477.104,4	
		02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	83 Persen		
		03 - Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	1	62.264 Orang		
07.01 03.01 ProP : Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	3 Dokumen	25 629,7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03.02 ProP Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	63 Persen	119.380,2	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03 03 ProP : Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	1	62.264 Orang	290.185,3	Kementerian Komunikasi dan Informatika



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
-A.VII.3-

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 01.03.04 ProP : Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	4 400 Orang	2.433,1	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03 05 ProP : Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya penelitian strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Jumlah penelitian strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	4	1 Kajian	1 500,0	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07 01 03 06 ProP Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	74,3 Nilai	18 303,4	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07.01.03.07 ProP Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	57 Lembaga Penyiaran	19 672,7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
07.02 PP : Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral 03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 04 - Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI	5 5 1	10 Forum 3,85 Nilai 87,00 Nilai	368 402,8	
07.02.01 KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	01 - Terwujudnya penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim 02 - Persentase Kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	2 1	49,64 Nilai 74 Persen	284.097,8	
07 02.01 01 ProP : Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 Persen	16.583,8	Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG)
07.02 01 02 ProP : Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri 02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri 03 - Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	1 1 1	96 42 Nilai 95 38 Nilai 95 48 Nilai	267.514,0	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
07.02.02 KP : Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah Program/Kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan Triangular	5	85 Program/Kegiatan	76.305,0	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.4-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arah Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.02.02.01 ProP Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	5	Rp110,48 Miliar	73 705,0	Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
07.02.02.02 ProP : Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (<i>Enabling environment</i>) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,48-2,55 Persen	2.600,0	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
07.02.03 KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	85 Persen	1 500,0	
07.02.03.01 ProP . Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	5	98 Persen	1 500,0	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
07.02.04 KP : Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	96 Persen	6.500,0	
		02 - Presentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	5	96 Persen		
		03 - Presentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	5	85 Persen		
		04 - Presentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	5	99 Persen		
07.02.04.01 ProP . Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima	01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	5	250 Rekomendasi/Prakarsa	4 000,0	Kementerian Luar Negeri
		02 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	5	153 Rekomendasi/Prakarsa		
07.02.04.02 ProP : Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jaringan 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jaringan 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peningkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10 Peningkat	2 500,0	Kementerian Luar Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.5-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.03 PP : Penegakan Hukum Nasional	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Persepsi Anti Korupsi	5	4,03 Nilai	382.936,0	
07.03.01 KP : Penataan Regulasi	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan MK dan MA	3	11,15 dan 10,05 Persen	6.293,0	
07.03.01.01 ProP Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,1 Persen	1.600,0	Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi RI
07.03.01.02 ProP Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	4.693,0	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
07.03.02 KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>enforcing contracts</i>	5	Peringkat 110	148.942,4	
		02 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>resolving insolvency</i>	5	Peringkat 28		
		03 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek <i>getting credits</i>	5	Peringkat 28		
		04 - Persentase pelaku residivis	5	8,06 Persen		
07.03.02.01 ProP Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 Persen	5.500,0	Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
07.03.02.02 ProP Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan	1	15 Persen	8.581,0	Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung
07.03.02.03 ProP Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 Wilayah Kerja	129.361,4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
07.03.02.04 ProP Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	7,04 Nilai	5.500,0	Komisi Yudisial Republik Indonesia
07.03.03 KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi	01 - Terwujudnya penguatan sistem antikorupsi	01 - Survey Penilaian Integritas	5	70 Nilai	82.411,3	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.6-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahkan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.03.03.01 ProP Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	35 Persen	62.016,3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia
07.03.03.02 ProP Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	1	160 Orang	20.395,0	Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
07.03.04 KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses terhadap Keadilan	5	Persen	145.289,3	
07.03.04.01 ProP Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan	5	-	125.933,3	Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
07.03.04.02 ProP Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	Persen	19.356,0	Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI
07.04 PP : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah	01 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas Kementerian	1	100,00 Persen	258.325,9	
		02 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas LPNK	1	80,00 Persen		
		03 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas Provinsi	1	49,00 Persen		
		04 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas Kabupaten/ Kota	1	15,00 Persen		
		05 - Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	4	142 per 587 Instansi Pemerintah		
		06 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturlitas SPBE kategori baik ke atas Kementerian/ Lembaga	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		07 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturlitas SPBE kategori baik ke atas Provinsi	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		08 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Maturlitas SPBE kategori baik ke atas Kabupaten/ Kota	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		09 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP Kementerian/ Lembaga	4	92,00 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.7-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		10 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP: Provinsi	4	92,00 Persen		
		11 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP: Kabupaten	4	80 Persen		
		12 - Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP Kota	4	92,00 Persen		
		13 - Persentase instansi pemerintah dengan Skor B ke atas Atas SAKIP: Kementerian/Lembaga	4	96,00 Persen		
		14 - Persentase instansi pemerintah dengan Skor B ke atas Atas SAKIP: Provinsi	4	87,00 Persen		
		15 - Persentase instansi pemerintah dengan Skor B ke atas Atas SAKIP: Kabupaten/Kota	4	55,00 Persen		
07.04.01 KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penguatan implementasi manajemen ASN	01 - Persentase kementerian dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	100 Persen	47.946,3	
		02 - Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori baik ke atas	1	80 Persen		
		03 - Persentase provinsi dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	49 Persen		
		04 - Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	15 Persen		
07.04.01.01 ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	01 - Terbangunnya manajemen talenta nasional ASN	01 - Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN	1	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan	15.400,0	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.04.01.02 ProP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	01 - Terlaksananya peningkatan penerapan sistem merit ASN	02 - Jumlah instansi pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori baik ke atas	1	108 Instansi Pemerintah	32.546,3	Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.04.02 KP : Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya transformasi pelayanan publik	01 - Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	4	142 per 587 Instansi	44.255,0	
07.04.02.01 ProP : Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	01 - Tersedianya portal pelayanan publik pemerintah pusat	4	1 (tahun 2024)	4.500,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Tersedianya portal pelayanan publik pemerintah daerah	4	1 (tahun 2024)		
07.04.02.02 ProP : Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan	4	6.300 Laporan	34.600,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.8-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07.04.02.03 ProP Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi	4	500 UPP	2 155,0	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07 04 02 04 ProP Penguatan Pelayanan Terpadu	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan terpadu	01 - Jumlah Mal Pelayanan Publik di kota besar/ sedang/KEK	4	9 Mal Pelayanan Publik	3.000,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.04.03 KP : Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	01 - Tertatanya kelembagaan dan proses bisnis	01 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/ lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas 02 - Persentase instansi pemerintah daerah (provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas 03 - Persentase instansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Indeks Maturitas SPBE baik ke atas	4 4 4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan Persen Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan Persen Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan Persen	64 133,2	
07.04 03 01 ProP Penataan Kelembagaan	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 Instansi	10 320,7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07 04 03 02 ProP Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Terlaksananya penerapan SPBE terintegrasi	01 - Integrasi portal pelayanan publik dan integrasi portal administrasi pemerintahan	4	2 Portal (Tahun 2024)	53.812,5	Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
07.04.04 KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	01 - Terwujudnya reformasi sistem akuntabilitas kinerja	01 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/ lembaga) yang mendapatkan Opini WTP 02 - Persentase instansi pemerintah provinsi yang mendapatkan Opini WTP 03 - Persentase instansi pemerintah kabupaten yang mendapatkan Opini WTP 04 - Persentase instansi pemerintah kota yang mendapatkan Opini WTP 05 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/ lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP 06 - Persentase instansi pemerintah daerah (provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP 07 - Persentase instansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	4 4 4 4 4 4 4	92 Persen 92 Persen 80 Persen 92 Persen 96 Persen 87 Persen 55 Persen	101 991,4	
07.04.04.01 ProP : Perluasan Implementasi Sistem Integritas	01 - Terlaksananya perluasan implementasi sistem integritas	01 - Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	4	100 WBK/WBBM	7 000,0	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.VII.9-**

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 04.04 02 ProP : Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi	01 - Terlaksananya penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	01 - Persentase instansi pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	4	42.53 Persen	87 391,4	Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
		02 - Persentase instansi pemerintah provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	4	15 Persen		
		03 - Persentase Instansi Pemerintah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	4	10 persen		
		04 - Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	4	40 Persen		
		05 - Persentase instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan Skor SAKIP B Ke atas	4	96 Persen		
		06 - Persentase instansi pemerintah daerah (provinsi) dengan Skor SAKIP B Ke atas	4	87 Persen		
		07 - Persentase instansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan Skor SAKIP B Ke atas	4	55 Persen		
07 04 04 03 ProP Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	01 - Terlaksananya penguatan perencanaan dan penganggaran	01 - Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pamantauan, evaluasi, dan audit	4	40 Persen	7.600,0	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
07.05 PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Terjaganya stabilitas keamanan nasional	01 - Indeks Kekuatan Militer	5	0,25 Nilai	30.216.834,6	
		02 - Indeks Global Terorisme	5	4,39 Nilai		
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	5	>55 Persen		
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	5	3,20 Nilai		
07.05.01 KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	5	38,14 Nilai	1 325.750,0	
		02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	5	54,36 Nilai		
		03 - Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	5	<300 Pelanggaran		
		04 - Angka Kejadian Konflik	5	50 Kejadian		
		05 - Angka Korban Pengungsi Internal	5	≤15.500 orang		
07 05 01 01 ProP : Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Terlaksananya peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - Clearance Rate Terorisme	5	75 Persen	272.954,0	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
-A.VII.10-**

PK/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar dalam radikal terorisme	5	125 Orang		
		03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	134 Kegiatan		
		04 - Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme	5	40 Institusi		
07.05.01.02 ProP : Penguatan Obyek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan obyek vital dan target rentan	01 - Jumlah Obyek Vital dan Target Rentan yang Mendapat Pengamanan	2	1.023 Obyek Vital dan Target Rentan	85.928,1	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07.05.01.03 ProP : Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah jenis sarpras perbatasan yang dibangun	2	5 Jenis	945.819,7	Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		02 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankam	1	180 Orang		
		03 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	41 PPKT		
07.05.01.04 ProP : Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulangnya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	1	25 Kasus	19.886,8	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial
		02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	15.338 Orang		
07.05.01.05 ProP : Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah kegiatan penyelamatan di wilayah rawan dan bencana	1	1 Kegiatan	1.161,4	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07.05.02 KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	01 - Terwujudnya penguatan kemampuan pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	01 - Angka pemenuhan MEF	2	79 Persen	26.004.246,4	
		02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 Persen		
07.05.02.01 ProP : Pengadaan Alutsista	01 - Terpenuhinya pengadaan Alutsista	01 - Jenis Alutsista yang diadakan	2	60 Jenis	17.702.850,8	Kementerian Pertahanan
07.05.02.02 ProP : Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Alutsista	01 - Jenis Alutsista dengan persentase pemenuhan Norma Harwat 100%	2	49 Jenis	6.189.594,0	Kementerian Pertahanan
07.05.02.03 ProP : Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	01 - Luas Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	2	118.000 m ²	1.014.702,6	Kementerian Pertahanan
07.05.02.04 ProP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terlaksananya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit	01 - Jumlah unit rumah dinas yang terbangun	2	2.410 Unit	989.599,0	Kementerian Pertahanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-A.VII.11-**

PM/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah rumah sakit meningkat akreditasinya	1	9 Unit		
07.05.02.0 ProP : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan industri pertahanan	01 - Jumlah Jenis Alpalhankam yang Dikembangkan	5	3 Jenis	107.500,0	Kementerian Pertahanan
07.05.03 KP : Penguatan Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	5	265 Kasus	1.138.369,8	
07.05.03.02 ProP : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas operasi keamanan laut	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	5	60 Persen	1.137.449,2	Badan Keamanan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan
07.05.03.03 ProP Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terlaksananya peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana laut	5	75 Persen	920,6	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07.05.04 KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1	1,86 Persen	860.769,0	
		02 - <i>Crime Rate</i>	5	112 Orang/100.000 Penduduk		
		03 - Pelayanan Publik Polri yang Prima	4	63 Persen		
07.05.04.01 ProP Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana narkotika	4	86 Persen	85.735,6	Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	4 Kawasan		
07.05.04.02 ProP Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Terlaksananya peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	51 Nilai	188.847,0	Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika: aspek fisik	1	6,5 Persen		
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika: aspek psikologis	1	6,5 Persen		
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika: aspek hubungan sosial	1	5,5 Persen		
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	4,5 Persen		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
-A.VII.12-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	1	3,1 Nilai		
07 05 04.03 ProP : Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - Clearance rate tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	83 Persen	9 000,0	Kepolisian Negara Republik Indonesia
07 05 04.04 ProP : Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,2 Nilai	4.500,0	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Clearance Rate	4	64 Persen		
		03 - Clearance rate tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	58 Persen		
07.05.04.05 ProP Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan Almatsus dan Alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah Almatsus dan Alpalkam Kepolisian	2	3 Paket	173 720,2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Persentase Almatsus dan Alpalkam kontribusi industri pertahanan	2	25 Persen		
07 05 04 06 ProP Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	01 - Terlaksananya peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan anggota POLRI	01 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	445 Unit	398.966,2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 Unit		
		03 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	77 Persen		
07.05.05 KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor Global <i>Cyber Security Index</i>	1	0,792 Nilai	887.699,4	
07 05 05 01 ProP Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1	0,159 Nilai	13 200,0	Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara
07 05.05.02 ProP Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber yang Kuat	01 - Skor Pilar <i>Organizational</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	4	0,13 Nilai	833 068,4	Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Republik Indonesia
		03 - Skor Pilar <i>Capacity Building</i> pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	1	0,189 Nilai		
		02 - Skor Pilar <i>Technical</i> pada <i>Global Cyber Security Index</i> (GCI)	2	0,159 Nilai		
07 05.05.03 ProP : Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - Clearance rate tindak pidana siber	5	0,62 Persen	26 931,0	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-A.VII.13-

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Pelaksana
07 05 05 04 ProP Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional Bidang Siber	01 - Skor Pilar Cooperation pada <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI)	5	0,12 Nilai	14 500,0	Badan Intelijen Negara

Keterangan

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional,
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dalam proses finalisasi detail target, alokasi, dan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional mencakup Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta),
- 4) Perubahan rincian beserta pendanaannya dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Departemen Hukum dan
Perundang-undangan,

Yohana Silvanna Djaman